Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak

Tanggal 31 Desember 2025 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

Independent Auditor's Report and Consolidated Financial Statements PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries

As of 31 December 2025, and for the Year Then Ended (Compared to 31 December 2024, and for the Year Then Ended)



PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

Nomor : 00199/2.0999/AU.1/06/0139-1/1/IV/2026
Tanggal : 8 April 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - iii
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK	
• **LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN** Tanggal 31 Desember 2025 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)	1 - 2
• **LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)	3
• **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)	4
• **LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)	5
• **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN** Tanggal 31 Desember 2025 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)	6 - 95
Informasi Tambahan:	
LAPORAN KEUANGAN POKOK PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri) Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)	
• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk Saja	
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja	
• Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja	
• Laporan Arus Kas - Induk Saja	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Heru Widodo
   Alamat kantor : Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat 10510
   NIK : 3674051712810007
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Bunga Herlina Oktaviyanti
   Alamat kantor : Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat 10510
   NIK : 3577034610830002
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 April 2026

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Direktur Utama	**Direktur Keuangan**
Heru Widodo	**Bunga Herlina Oktaviyanti**

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 -14

www.asdp.id

We Bridge the Nation

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DJOKO, SIDIK & INDRA
Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:
Nexia
Alliance of independent firms

Nomor : 00199/2.0999/AU.1/06/0139-1/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan dan Direksi Komisaris
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas Laporan Keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai nomor laporan 00473/2.1030/AU.1/06/1155-5/1/IV/2025, tanggal 17 April 2025.

HEAD OFFICE :
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 39838734, 39838735, Fax : 62-21 39832081
Website : www.kapdsi.com, E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA

Indra Soesetiawan, M.H., Ak., CPA., CA., Asean CPA., CFI., CACP.
NRAP : AP. 0139

8 April 2026

00199

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2e;2h;4	1.940.072.274.317	1.836.374.520.725
Piutang Usaha	2e;2g;5		
- Pihak berelasi	2e;5	38.596.296.345	11.894.350.992
- Pihak ketiga	5	35.037.634.064	19.856.396.390
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2g;6	62.628.780.963	47.115.075.190
Pendapatan yang Masih Harus Diterima			
- Pihak berelasi	2g;7	95.551.400.365	59.775.185.289
- Pihak ketiga	2g;7	5.071.466.591	893.059.002
Persediaan	2i;8	146.049.795.741	128.288.962.823
Pajak Dibayar Dimuka	16.a	12.407.605.984	9.213.943.678
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	2j;9	64.071.648.722	51.820.010.502
Jumlah Aset Lancar		**2.399.486.903.092**	**2.165.231.504.591**
Aset Tidak Lancar			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Pihak berelasi	2g;3.2;7	65.437.720.657	85.627.167.675
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2g;3.2;10	275.387.185.873	275.434.971.034
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	2j;3.2;9	391.080.139	467.889.787
Properti Investasi	2k;3.2;11	699.760.379.996	701.343.695.900
Aset Tetap	2l;12	7.872.523.634.961	8.132.548.053.145
Aset Hak Guna	2n;3.2;13	25.245.883.578	27.443.451.589
Aset Takberwujud	2m;14	16.387.613.039	23.005.906.405
Aset Pajak Tangguhan	2q;16.d	64.942.513	61.010.798
Jumlah Aset Tidak Lancar		**8.955.198.440.756**	**9.245.932.146.333**
JUMLAH ASET		**11.354.685.343.848**	**11.411.163.650.924**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	2e;15		
- Pihak Berelasi	2e	55.216.709.588	78.474.809.180
- Pihak Ketiga		401.760.763.227	371.170.594.962
Utang Pajak	2q;16b	43.563.526.826	42.369.226.319
Utang Asuransi	2g;17	26.854.074.367	25.836.228.882
Beban Akrual dan Provisi	2g;18	381.256.044.659	359.207.430.193
Utang Bank Jangka Pendek	2g;20	-	23.836.020.000
Liabilitas Jangka Jangka Pendek Lainnya	2g;19		
- Pihak Berelasi	2e	756.517.767	13.407.658.513
- Pihak Ketiga		121.200.085.262	104.150.030.482
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang:			
- Pinjaman Bank	20	259.697.547.739	263.432.165.478
- Pinjaman Sindikasi	21,36,37	44.400.000.000	34.300.000.000
- Liabilitas Sewa	13,37	6.581.101.566	13.934.482.121
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**1.341.286.371.001**	**1.330.118.646.130**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek:			
- Pinjaman Bank	2g;20	206.036.856.955	449.402.237.748
- Pinjaman Sindikasi	2g; 21; 36; 37	587.663.376.149	630.902.417.816
- Liabilitas Sewa	2n, 13, 37	4.743.923.460	9.091.704.617
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	36		
- Pihak Berelasi	2e;31	1.921.536.772	1.831.025.176
- Pihak Ketiga		4.127.482.265	5.513.737.673
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2p; 22	106.643.909.124	117.308.051.512
Liabilitas Pajak Tangguhan	2q;16d	67.299.881.406	68.140.433.008
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**978.436.966.131**	**1.282.189.607.550**
Jumlah Liabilitas		**2.319.723.337.132**	**2.612.308.253.680**
Ekuitas			
Modal Saham:			
- Modal Dasar - 10.000.000 Saham dengan (2024: 10.000.000 Saham) Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.561.760 Saham (2024:5.561.760 Saham)	23	5.561.760.000.000	5.561.760.000.000
Tambahan Modal Disetor	24	8.445.362.065	8.445.362.065
Saldo Laba:			
- Telah Ditentukan Penggunannya	25	2.807.583.928.196	2.413.803.355.650
- Belum Ditentukan Penggunannya		461.739.024.742	631.837.202.751
Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		8.839.528.315.003	8.615.845.920.466
Kepentingan Nonpengendali		195.433.691.713	183.009.476.778
Jumlah Ekuitas		**9.034.962.006.716**	**8.798.855.397.244**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**11.354.685.343.848**	**11.411.163.650.924**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan Usaha	2r;26	4.962.464.638.244	5.024.558.826.164
Beban Pokok Pendapatan	2r;27	(3.577.017.386.650)	(3.397.603.862.554)
Laba Bruto		**1.385.447.251.594**	**1.626.954.963.610**
Beban Administrasi dan Umum	2r;3;28	(1.102.483.720.833)	(1.063.012.739.063)
Pendapatan Lainnya	29	101.821.040.754	93.520.027.671
Beban Lainnya	29	(30.934.010.159)	(108.392.177.625)
Beban Pajak Final		(36.670.915.511)	(38.606.876.803)
Laba Usaha		**317.179.645.845**	**510.463.197.790**
Pendapatan Keuangan	2r;30	91.994.541.215	77.384.368.282
Beban Keuangan	2r;30	(98.921.933.935)	(115.418.684.592)
Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih		**(6.927.392.720)**	**(38.034.316.310)**
Laba sebelum Pajak		**310.252.253.125**	**472.428.881.480**
Beban Pajak Penghasilan	16.c	**(24.821.860.832)**	**(25.122.914.029)**
Laba Tahun Berjalan		**285.430.392.293**	**447.305.967.451**
Penghasilan Komprehensif Lain			
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		(5.576.208.851)	(3.411.292.599)
- Pajak Penghasilan Terkait		1.216.537.509	921.269.656
Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak		**(4.359.671.342)**	**(2.490.022.943)**
Jumlah Penghasilan Komprehensif		**281.070.720.951**	**444.815.944.508**
Laba yang Diatribusikan Kepada:			
- Pemilik Entitas Induk		272.986.840.366	438.744.684.039
- Kepentingan Nonpengendali		12.443.551.927	8.561.283.412
Jumlah Laba Tahun Berjalan		**285.430.392.293**	**447.305.967.451**
Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
- Pemilik Entitas Induk		268.646.506.021	436.073.652.970
- Kepentingan Nonpengendali		12.424.214.930	8.742.291.538
Jumlah Penghasilan Komprehensif		**281.070.720.951**	**444.815.944.508**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal yang Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba			Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah		
Saldo Per 1 Januari 2024 / 31 Desember 2023		**5.173.195.000.000**	**397.010.172.065**	**1.831.026.929.440**	**809.212.619.476**	**8.210.444.720.981**	**174.267.185.240**	**8.384.711.906.221**
Modal Ditempatkan dan Disetor	23	388.565.000.000	(388.564.810.000)	(190.000)	-	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	24	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	25	-	-	582.776.616.210	(582.776.616.210)	-	-	-
Dividen Tunai	25	-	-	-	(30.672.453.485)	(30.672.453.485)	-	(30.672.453.485)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	438.744.684.039	438.744.684.039	8.561.283.412	447.305.967.451
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	-	(2.671.031.069)	(2.671.031.069)	181.008.126	(2.490.022.943)
Saldo Per 31 Desember 2024		**5.561.760.000.000**	**8.445.362.065**	**2.413.803.355.650**	**631.837.202.751**	**8.615.845.920.466**	**183.009.476.778**	**8.798.855.397.244**
Modal Ditempatkan dan Disetor		-	-	-	-	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	24	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	25	-	-	393.780.572.546	(393.780.572.546)	-	-	-
Dividen Tunai	25	-	-	-	(44.964.111.502)	(44.964.111.502)	-	(44.964.111.502)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	272.986.840.366	272.986.840.366	12.443.551.927	285.430.392.293
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-		(4.340.334.327)	(4.340.334.327)	(19.336.992)	(4.359.671.319)
Saldo Per 31 Desember 2025		**5.561.760.000.000**	**8.445.362.065**	**2.807.583.928.196**	**461.739.024.742**	**8.839.528.315.003**	**195.433.691.713**	**9.034.962.006.716**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pelanggan		4.954.690.132.541	5.029.483.008.821
Pembayaran kas kepada Pemasok		(2.219.755.975.247)	(2.138.288.968.395)
Pembayaran kepada Karyawan		(1.127.918.317.539)	(1.089.194.335.373)
Pembayaran Beban Usaha		(512.019.678.889)	(493.596.602.717)
Penerimaan Lain-lain		54.734.746.934	67.259.879.700
Pembayaran Bunga Pinjaman		(97.466.709.488)	(113.287.083.746)
Penerimaan Bunga	30	91.650.103.101	77.384.368.282
Pembayaran Pajak Penghasilan		(147.143.666.269)	(178.457.747.522)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**996.770.635.144**	**1.161.302.519.050**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Jaminan Usaha		43.720.341.127	30.252.327.477
Pembayaran Jaminan Usaha		(33.194.295.809)	(29.318.151.568)
Perolehan Aset Takberwujud	14	(2.224.327.606)	(9.571.368.996)
Perolehan Aset Tetap		(515.920.729.965)	(614.092.376.971)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(507.619.012.253)**	**(622.729.570.058)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pencairan Pinjaman Sindikasi		-	-
Pembayaran Pinjaman Sindikasi		(34.300.000.000)	(26.300.000.000)
Pembayaran Pinjaman Bank	20	(270.936.018.532)	(256.221.460.499)
Penerimaan Pinjaman Bank	20	-	159.500.000.000
Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi		130.700.000.500	124.793.654.642
Pembayaran Pinjaman Pihak Berelasi		(143.300.000.500)	(122.100.000.000)
Pembayaran Dividen	25	(44.964.111.493)	(30.672.453.485)
Pembayaran Liabilitas Sewa	37	(24.255.618.238)	(41.388.939.255)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(387.055.748.263)**	**(192.389.198.597)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		**102.095.874.628**	**346.183.750.395**
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS		1.601.878.964	1.845.814.016
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	2e;2f;4	**1.836.374.520.725**	**1.488.344.956.314**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	2e;2f;4	**1.940.072.274.317**	**1.836.374.520.725**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tahun 1973 dengan nama Proyek Angkutan Sungai Danau dan Ferry (PASDF) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM.50/R/PHB-1973 tanggal 27 Maret 1973, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1986, status Perusahaan ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PERUM ASDP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1992 tanggal 17 Maret 1992, Pemerintah meningkatkan status dari bentuk PERUM ASDP menjadi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero).

Anggaran dasar telah mengalami beberapa perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 17 tanggal 21 November 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H. M.kn. Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0359786 tanggal 28 November 2025.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, aktivitas penunjang angkutan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1973.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Ahmad Yani No. 52 A, Jakarta Timur. Jumlah cabang operasional dan pelabuhan Perusahaan terdiri dari 27 cabang operasional dan 36 pelabuhan sesuai dengan surat keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.186/HK.001/ASDP-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: KD.129/HK.001/ASP-2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PT Danantara Asset Management (Persero) adalah pemegang saham perusahaan dengan kepemilikan 99,99998% dan Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 0,00002%.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan Akta No. 17 tanggal 21 November 2025 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dengan Surat Pemberitahuan No.AHU-AH.01.09-0359786 tanggal 28 November 2025 dan Akta No. 05 tanggal 10 Desember 2024 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dengan Surat Pemberitahuan No.AHU-AH.01.09-0286416 tanggal 11 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

	2025	2024
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Achmad Baidowi	Achmad Baidowi
Komisaris Independen	Siti Ariani Muflikhah	Siti Ariani Muflihkhah
Komisaris	Susi Meyrista Tarigan	Susi Meyrista Tarigan
Komisaris	Elba Damhuri	Elba Damhuri
Komisaris	Joddy Hernady	Joddy Hernady
Komisaris	Taufik Rachman	Taufik Rachman
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Heru Widodo	Heru Widodo
Wakil Direktur Utama	Yossianis Marciano	Yossianis Marciano
Direktur Teknik	Nana Sutisna	Kusnadi Chandra Wijaya
Direktur Keuangan	Bunga Herlina Oktaviyant	Djunia Satriawan
Direktur SDM dan Layanan Korporasi	Rudi Sunarko	Wahyu Wibowo
Direktur Operasi dan Transformasi	Rio Theodore Natalianto Lasse	Rio Theodore Natalianto Lasse

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sejumlah 5.127 dan 5.122 orang (tidak diaudit).

Susunan anggota Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Ketua	Joddy Hernady	Joddy Hernady
Wakil Ketua	Susi Meyrista Tarigan	Susi Meyrista Tarigan
Anggota	Muhamad Farkhan Supriya	Made Sumadi Arta
Anggota	Suhendar	Triandi Kiansyah
Anggota	Taufik Rachman	Taufik Rachman

Sekretaris Perusahaan adalah Windy Sustia Andale dan Shelvy Arifin masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024. Kepala Internal Audit Perusahaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing dijabat Imran Kuru dan Theresia Damayanti.

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak yang dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha Utama	Lokasi Domisili	Tahun Beroperasi Komersil	Persentase Kepemilikan 2025 (%)	Persentase Kepemilikan 2024 (%)	Total Aset 2025	Total Aset 2024
PT Indonesia Ferry Properti	Perdagangan Umum dan Real Estat/ *General Trade and Real Estate*	Jakarta	2017	51,00	51,00	1.117.001.114.326	1.113.742.689.634
PT Jembatan Nusantara	Jasa Pelayaran/ *Shipping Services*	Surabaya	1975	99,99	99,99	1.430.048.223.929	1.647.968.126.967

PT Indonesia Ferry Property (IFPRO)

PT Indonesia Ferry Properti didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 21 tanggal 5 September 2017 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya Nomor AHU.0041206.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017. Berdasarkan Akta No.10 tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No.AHU-AH.01.03-0063595 tanggal 12 Februari 2018, Perusahaan memiliki 157.887 lembar saham senilai Rp157.887.000.000 yang mewakili kepemilikan saham sebesar 51,00%.

PT Jembatan Nusantara (JN)

Perusahaan mengakuisisi JN berdasarkan Akta No. 140 tanggal 22 Februari 2022 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0116605 tanggal 22 Februari 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 12 Oktober 2022 oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0204896.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022, Perusahaan memiliki 2.507.655.209 lembar saham senilai Rp1.253.827.604.500 yang mewakili kepemilikan sebesar 99,99%.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2.a Pernyataan Kepatuhan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

2.b Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 2d.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah Rupiah. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.c Standar Akuntansi Keuangan Baru, Amendemen, dan Penyesuaian

a) Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun 2024

- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa–Balik;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; serta
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada tahun 2024, Grup telah menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK yang relevan dengan kegiatan usaha Grup. Penerapan standar tersebut tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

b) Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun 2025

- PSAK 117, “Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 117, “Kontrak Asuransi” tentang Penerapan Awal PSAK 104 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif;
- PSAK 103: "Kombinasi Bisnis"; PSAK 105: "Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"; PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; PSAK 109: "Instrumen Keuangan"; PSAK 115: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan"; PSAK 207: "Laporan Arus Kas"; PSAK 216: "Aset Tetap"; PSAK 219: "Imbalan Kerja"; PSAK 228: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; PSAK 232: "Instrumen Keuangan: Penyajian"; PSAK 236: "Penurunan Nilai Aset"; PSAK 237: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"; PSAK 238: "Aset Takberwujud"; serta PSAK 240: "Properti Investasi" - Amendemen konsekuensial karena berlaku efektifnya PSAK 117: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 221, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” terkait Kekurangan Ketertukaran.
- PSAK 370: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" dan ISAK 335: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" - Amendemen konsekuensial karena berlaku efektifnya SAK Indonesia untuk Entitas Privat.

Pada tanggal 1 Januari 2025, Grup telah menerapkan standar dan amendemen PSAK yang relevan dengan kegiatan usaha Grup.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.c Standar Akuntansi Keuangan Baru, Amendemen, dan Penyesuaian (lanjutan)

b) Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun 2025 (lanjutan)

Manajemen telah melakukan evaluasi terhadap penerapan standar tersebut, termasuk analisis terhadap akun pendapatan, instrumen keuangan, serta aset hak-guna dan liabilitas sewa. Berdasarkan evaluasi tersebut, penerapan standar tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi maupun dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c) Standar yang Telah Diterbitkan, tetapi Belum Berlaku Efektif

- PSAK 109: "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked* , aset keuangan dengan fitur *non-recourse* , dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti, *tranche* .
- Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Standar, amendemen, dan penyesuaian PSAK yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 antara lain mencakup penyesuaian tahunan PSAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards Annual Improvements – Volume 11.

c) Standar yang Telah Diterbitkan, tetapi Belum Berlaku Efektif

Grup tidak melakukan penerapan dini atas standar tersebut. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen masih melakukan evaluasi atas dampak yang mungkin timbul, namun diperkirakan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2.d Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.d Prinsip-prinsip Konsolidasian

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.d Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf - a);
vii Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
vii Entitas atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.e Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi dengan entitas dan/atau grup mencakup Pemerintah Republik Indonesia serta entitas lain yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau berada di bawah pengaruh signifikan Pemerintah Republik Indonesia (entitas sepengendali pemerintah). Pengendalian tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui kementerian terkait atau melalui badan pengelola investasi pemerintah, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

2.f Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu dalam Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap individu entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs *spot* antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
USD	16.782	16.162
EUR	19.753	16.851

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada 31 Desember 2025 semua aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*).

Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga *(Solely Payments of Principal and Interest - SPPI)* dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan nilainya atau jarang terjadi.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

a) Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
b) Nilai waktu uang; dan
c) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misalnya, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif (lanjutan)

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Grup terutama terdiri dari liabilitas sewa, utang bank, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang dana pension dan utang sewa pembiayaan.

Liabilitas sewa, utang bank, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang dana pensiun, utang sewa pembiayaan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi *input* terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
ii. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk asset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
iii. *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.h Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas dari setiap entitas di grup, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.j Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.k Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

a) Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau, pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
b) Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
c) Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
d) Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.L Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	5 - 20
Bangunan Pelabuhan	5 - 20
Armada Kapal	5 - 30
Kendaraan	5
Peralatan Kantor	5

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset Dalam Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.m Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada). Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomis dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset takberwujud, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sehubungan dengan lisensi *software* selama 5 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

2.n Sewa

Pada tanggal insepsi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

a) Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
b) Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
   (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
   (ii) Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
   - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
   - Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.n Sewa (lanjutan)

Grup Sebagai Penyewa *(Lessee)*

Pada tanggal permulaan, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa dengan:
a) Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
c) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Grup sebagai Pemberi Sewa (*Lessor*)

Grup mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.o Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1) Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.o Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

1) Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut: (lanjutan)
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan.
   - Kontrak memiliki substansi komersial.
2) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3) Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4) Mengalokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:
- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.p Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika seorang karyawan telah bekerja dalam suatu periode akuntansi. Jumlah imbalan kerjanya diukur berdasarkan nilai nominal tanpa memperhitungkan nilai tunainya.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Untuk program pensiun iuran pasti, Grup membayar iuran kepada program asuransi pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.p Imbalan Kerja

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b. Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur serta mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.q Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a) Pengakuan awal goodwill;
b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.q Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. Entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.r Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Perusahaan melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor- faktor seperti kondisi teknis (estimasi daya pakai, pengoperasi, pemeliharaan) dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap disajikan di Catatan 12.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan rata-rata tingkat suku bunga obligasi pemerintah pada pasar yang aktif yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah. Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan dan nilai tercatat diungkapkan pada Catatan 22.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 5.

Pengukuran Nilai Wajar untuk Properti Investasi

Properti investasi Perusahaan diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Perusahaan menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, dan pendekatan pasar. Nilai tercatat properti investasi diungkapkan dalam Catatan 11.

ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.g dan 38.

3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

iii. Kombinasi Bisnis dan Penurunan Nilai Aset

Pada Februari 2022, Grup mengakuisisi PT Jembatan Nusantara ("JN") dan mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon (bargain purchase) sebesar Rp103.595.656.393 sesuai dengan PSAK 103 (d.h. PSAK 22): Kombinasi Bisnis.

Akuisisi saham JN pada tahun 2022 menghasilkan keuntungan secara konsolidasian dari akuisisi saham JN dengan diskon.

Dengan demikian, Grup tidak mengakui goodwill sehubungan dengan akuisisi saham JN karena transaksi tersebut menghasilkan keuntungan dari akuisisi saham JN dengan diskon (bargain purchase).

Manajemen telah melakukan penelaahan kembali atas identifikasi dan pengukuran seluruh aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi dan meyakini bahwa, pengakuan tersebut telah mencerminkan nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Pada tahun 2025, Grup memperoleh penilaian independen yang menunjukkan adanya perubahan nilai aset bersih JN dibandingkan dengan nilai pada tanggal akuisisi. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, kinerja operasional, serta asumsi ekonomi yang digunakan dalam penilaian.

Manajemen menilai bahwa, perubahan tersebut tidak mencerminkan kesalahan dalam pengukuran awal, melainkan merupakan perubahan estimasi dan kondisi ekonomi setelah tanggal akuisisi sesuai dengan PSAK 208 (d.h. PSAK 25): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Grup tidak melakukan penyesuaian atas nilai keuntungan dari akuisisi saham JN dengan diskon yang telah diakui pada tahun 2022.

Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai atas aset per 31 Desember 2025 sesuai sesuai dengan PSAK 236 (d.h. PSAK 48): Penurunan Nilai Aset, dan berdasarkan hasil pengujian tersebut, terdapat penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Pengujian penurunan nilai atas aset tertentu yang berasal dari akuisisi saham JN dilakukan pada tanggal 31 Desember 2025.

Asumsi utama yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai meliputi tingkat diskonto, tingkat pertumbuhan, dan proyeksi arus kas, yang ditentukan berdasarkan kondisi pasar terkini dan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa, estimasi yang digunakan adalah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas	**2.371.271.585**	**2.655.123.059**
Bank		
Pihak Berelasi (Catatan 31)		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	347.641.313.038	284.674.576.558
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	32.941.429.792	155.079.036.251
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	542.249.923.473	151.546.064.680
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.411.148.856	149.130.976.441
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	76.233.511.977	63.926.809.388
	1.037.477.327.136	**804.357.463.318**
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2025:USD146,946.38; 2024:USD87,126.03)	2.466.054.149	1.408.130.895
Euro		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2025:EUR369.48; 2024: EUR489.48)	7.298.433	8.248.383
	2.473.352.582	**1.416.379.278**
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	111.400.044.369	119.602.819.854
PT Bank CIMB Niaga Tbk	23.843.747.994	32.297.635.881
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.636.662.913	1.673.020.190
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	5.697.738	17.609.145
	136.886.153.014	**153.591.085.070**
Total Bank	**1.176.836.832.732**	**959.364.927.666**
Deposito Berjangka		
Pihak Berelasi (Catatan 31)		
Rupiah		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	310.000.000.000	310.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000.000.000	125.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	25.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	10.000.000.000	-

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Deposito Berjangka		
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	25.000.000.000	-
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40.864.170.000	39.354.470.000
Total Deposito Berjangka	**760.864.170.000**	**874.354.470.000**
Total	**1.940.072.274.317**	**1.836.374.520.725**
Tingkat Bunga Deposito		
Rupiah	1,67%-4,99%	2,85%-6,20%
Dolar Amerika Serikat	2,19%	1,75%
Jangka Waktu	1 bulan	1 bulan

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan.

5. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan Pelanggan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)	38.838.915.608	12.708.371.691
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(242.619.263)	(814.020.699)
Sub Total	**38.596.296.345**	**11.894.350.992**
Pihak Ketiga	66.519.865.163	52.815.905.795
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(31.482.231.099)	(32.959.509.405)
Sub Total	**35.037.634.064**	**19.856.396.390**
Total	**73.633.930.409**	**31.750.747.382**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan Umur

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belum Jatuh tempo	59.085.311.364	28.599.939.058
Sampai dengan 30 Hari	4.793.977.039	3.145.078.056
31 - 60 Hari	5.357.049.025	3.000.045.814
60 - 90 Hari	2.763.212.141	1.514.284.844
Lebih dari 90 Hari	33.359.231.202	29.264.929.714
Sub Total	**105.358.780.771**	**65.524.277.486**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(31.724.850.362)	(33.773.530.104)
Total	**73.633.930.409**	**31.750.747.382**

c. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	33.773.530.104	26.236.549.843
Penambahan (Catatan 28)	21.248.925.438	27.591.846.276
Pemulihan (Catatan 29)	(23.297.605.180)	(20.054.866.015)
Total	**31.724.850.362**	**33.773.530.104**

Seluruh piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Piutang usaha dijadikan jaminan atas pinjaman sindikasi (Catatan 21).

6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bank Garansi	32.115.243.227	21.544.197.909
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	20.649.249.604	20.649.249.604
Lain-lain	9.864.288.132	4.921.627.677
Total	**62.628.780.963**	**47.115.075.190**

6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Bank Garansi merupakan jaminan pekerjaan atas pengoperasian *trip* subsidi kapal pada lintasan perintis antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Perusahaan.

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening penampungan pendapatan jasa pelabuhan Dermaga IV Merak-Bakauheni antara Perusahaan dengan PT Infiniti Indosakti. Perusahaan juga mencatat utang atas rekening penampungan tersebut (Catatan 18 dan 33.b).

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)	200.192.030.189	164.415.815.102
Pihak Ketiga	9.849.859.033	5.456.600.716
Total	**210.041.889.222**	**169.872.415.818**
Bagian Lancar	100.622.866.956	60.668.244.291
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Lancar	-	-
Bagian Lancar - Bersih	**100.622.866.956**	**60.668.244.291**
Bagian Tidak Lancar	109.419.022.266	109.204.171.527
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Tidak Lancar	(43.981.301.609)	(23.577.003.852)
Bagian Tidak Lancar - Bersih	**65.437.720.657**	**85.627.167.675**

Pendapatan yang masih harus diterima tidak lancar terutama merupakan pendapatan subsidi penyeberangan perintis tahun 2023 sebesar Rp104.350.293.813 yang masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait pembayarannya (Catatan 33.b).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan yang masih harus diterima adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	23.577.003.852	27.861.232.018
Penambahan (Catatan 28)	20.404.297.757	-
Pemulihan (Catatan 29)	-	(4.284.228.166)
Total	**43.981.301.609**	**23.577.003.852**

Pendapatan yang masih harus diterima terutama merupakan pendapatan subsidi atas pelayaran perintis dan penjualan bahan bakar minyak.

8. PERSEDIAAN

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Suku Cadang dan Perlengkapan Kapal	139.041.229.172	122.345.495.643
Perlengkapan dan Perabotan Hotel	3.703.182.664	2.971.063.116
Bahan Bakar	3.582.741.401	3.249.761.560
Sub Total	**146.327.153.237**	**128.566.320.319**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277.357.496)	(277.357.496)
Total	**146.049.795.741**	**128.288.962.823**
Saldo Awal	277.357.496	-
Penambahan	-	277.357.496
Total	**277.357.496**	**277.357.496**

Manajemen tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan pencurian mengingat jenis, sifat dan risiko masing-masing persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Tidak terdapat persediaan yang dijadikan jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Muka:		
Operasional	22.849.514.073	17.044.593.168
Pembangunan	13.832.753.109	18.076.307.806
Sub Total	**36.682.267.182**	**35.120.900.974**
Biaya Dibayar di Muka:		
Asuransi	12.625.949.620	8.941.688.897
Sewa	3.740.222.121	1.992.085.807
Lain-lain	11.414.289.938	6.233.224.611
Sub Total	**27.780.461.679**	**17.166.999.315**
Total	**64.462.728.861**	**52.287.900.289**
Dikurangi Bagian Tidak Lancar	(391.080.139)	(467.889.787)
Bagian Lancar	**64.071.648.722**	**51.820.010.502**

10. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Deposito yang Dijaminkan	275.000.000.000	275.000.000.000
Piutang Pegawai	2.260.519.335	2.260.519.335
Sub Total	**277.260.519.335**	**277.260.519.335**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.873.333.462)	(1.825.548.301)
Total	**275.387.185.873**	**275.434.971.034**

Deposito yang dijaminkan merupakan deposito milik Perusahaan yang menjadi jaminan utang bank di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 20).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai atas pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pegawai adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	1.825.548.301	1.760.611.985
Penambahan (Catatan 28)	47.785.161	64.936.316
Pemulihan (Catatan 29)	-	-
Total	**1.873.333.462**	**1.825.548.301**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang pegawai di kemudian hari.

11. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Reklasifikasi	Kenaikan/ (Penurunan) Nilai Wajar	Saldo Akhir
Nilai Wajar				
Tanah	141.953.429.900	(13.372.859.753)	10.620.157.849	139.200.727.996
Bangunan	559.390.266.000	595.561.201	573.824.799	560.559.652.000
Total	**701.343.695.900**	**(12.777.298.552)**	**11.193.982.648**	**699.760.379.996**

11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Reklasifikasi	Kenaikan/ (Penurunan) Nilai Wajar	Saldo Akhir
Nilai Wajar				
Tanah	138.857.400.000	(5.058.850.000)	8.154.879.900	141.953.429.900
Bangunan	564.462.300.000	1.161.792.110	(6.233.826.110)	559.390.266.000
Total	**703.319.700.000**	**(3.897.057.890)**	**1.921.053.790**	**701.343.695.900**

Properti investasi terutama merupakan bangunan Sosoro Mall Merak, Anjungan Mall Bakauheni dan Plaza Labuan Bajo, serta beberapa tanah yang tersebar di berbagai cabang di seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan penilai KJPP Munir, Wisnu, Heru, dan Rekan dalam laporan No. 00149/2.0129-02/PI/06/0569/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 nilai wajar properti investasi pada 31 Desember 2025 untuk tanah sebesar Rp139.200.727.996 serta bangunan sebesar Rp18.553.652.000 dan laporan penilai KJPP Rengganis, Hamid, dan Rekan dalam laporan No. 00011/2.0012-02/PI/03/0352/1/II/2026 tanggal 16 Februari 2026. Nilai dari properti investasi pada 31 Desember 2025 dan Rp 542.006.000.000.

Berdasarkan laporan penilai KJPP Munir, Wisnu, Heru, dan Rekan dalam laporan No.00130/2.0129-02/PI/06/0569/1/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 dan laporan penilai KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan No.00120/2.0027-05/PI/06/0278/1/III/2025 tanggal 23 Januari 2025, nilai wajar properti investasi pada 31 Desember 2024 untuk tanah sebesar Rp141.953.429.900 serta bangunan sebesar Rp19.754.266.000 dan Rp539.636.000.000.

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Metodologi penilaian yang digunakan dalam pendekatan pasar adalah metode perbandingan data pasar, metodologi yang digunakan dalam pendekatan biaya adalah metode biaya yang terdepresiasi *(Depreciated Replacement Cost /DCR)* , dan metodologi yang digunakan dalam pendekatan pendapatan adalah arus kas terdiskonto *(Discounted Cash Flow /DCF)* .

Pada tahun 2025, Grup melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi (Catatan 12).

Pada tahun 2025 dan 2024, kenaikan nilai wajar masing-masing sebesar Rp. 11.193.982.648 dan Rp 1.921.053.790 yang diakui pada pendapatan dan beban lainnya (Catatan 29).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, bangunan dan sarana prasarana – properti investasi dijaminkan untuk pinjaman sindikasi (Catatan 21).

11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Usaha (Catatan 26)		
Aneka Jasa dan Kerja Sama	20.911.302.959	17.517.664.461
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 27)		
Aneka Jasa dan Kerja Sama	7.333.832.517	8.461.353.409

12. ASET TETAP

	2025					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Penurunan Nilai	Saldo Akhir
Harga Perolehan						
Tanah	275.343.983.492	-	-	13.434.309.753	-	288.778.293.245
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	341.815.241.880	9.352.910.773	(6.391.858.096)	46.192.660.247	-	390.968.954.804
Bangunan Pelabuhan	4.838.534.074.870	89.410.386.654	-	64.345.059.517	-	4.992.289.521.041
Armada Kapal	6.970.633.374.602	179.328.152.383	(1.281.171.950)	102.885.368.131	-	7.251.565.723.166
Kendaraan	64.810.542.215	5.300.863.424	-	-	-	70.111.405.639
Peralatan Kantor	569.452.434.584	18.224.868.840	-	36.216.339.576	-	623.893.643.000
Aset Dalam Penyelesaian	228.749.524.257	215.234.559.639	(434.873.510)	(323.140.376.897)	-	120.408.833.489
Sub Total	**13.289.339.175.900**	**516.851.741.713**	**(8.107.903.556)**	**(60.066.639.673)**	**-**	**13.738.016.374.384**
Akumulasi Penyusutan dan beban penurunan nilai						
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	53.381.690.803	14.783.842.915	-	-	-	68.165.533.718
Bangunan Pelabuhan	1.564.191.971.799	206.983.026.492	-	(22.543.266.039)	-	1.748.631.732.252
Armada Kapal	3.069.683.933.717	319.071.585.152	(93.332.912)	(22.990.231.872)	156.948.069.252	3.522.620.023.337
Kendaraan	60.296.770.463	1.762.320.304	-	-	-	62.059.090.767
Peralatan Kantor	409.236.755.972	59.064.489.746	(4.284.886.369)	-	-	464.016.359.349
Sub Total	**5.156.791.122.754**	**601.665.264.609**	**(4.378.219.281)**	**(45.533.497.911)**	**156.948.069.252**	**5.865.492.739.423**
Nilai Buku	**8.132.548.053.146**					**7.872.523.634.961**

12. ASET TETAP (lanjutan)

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Penurunan Nilai / *Impairment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga Perolehan						
Tanah	259.723.902.932	10.561.230.560	-	5.058.850.000	-	275.343.983.492
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	708.599.233.139	7.413.139.485	-	36.881.983.864	-	752.894.356.488
Bangunan Pelabuhan	3.902.111.563.915	37.467.519.304	-	505.024.699.154	-	4.444.603.782.373
Armada Kapal	6.822.938.191.012	176.704.252.095	(29.009.068.507)	-	-	6.970.633.374.600
Kendaraan	65.349.374.247	684.624.945	-	(1.223.456.977)	-	64.810.542.215
Peralatan Kantor	390.730.371.178	33.725.786.913	(3.806.250)	147.469.713.852	-	571.922.065.693
Aset Dalam Penyelesaian	442.911.439.280	351.885.541.423	-	(566.283.537.456)	-	228.513.443.247
Sub Total	**12.592.364.075.703**	**618.442.094.725**	**(29.012.874.757)**	**126.928.252.437**	**-**	**13.308.721.548.108**
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	62.473.422.939	22.981.673.060	-	(1.099.291.338)	-	84.355.804.661
Bangunan Pelabuhan	1.398.445.236.129	164.224.034.262	-	-	-	1.562.669.270.391
Armada Kapal	2.778.137.080.585	299.186.758.764	(27.558.615.063)	-	9.857.030.241	3.059.622.254.527
Kendaraan	59.968.578.423	1.551.649.017	-	(1.223.456.977)	-	60.296.770.463
Peralatan Kantor	235.437.870.310	48.441.387.999	(3.806.250)	125.353.942.862	-	409.229.394.921
Sub Total	**4.534.462.188.386**	**536.385.503.102**	**(27.562.421.313)**	**123.031.194.547**	**9.857.030.241**	**5.176.173.494.963**
Nilai Buku	**8.057.901.887.317**					**8.132.548.053.145**

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 27)	536.337.051.883	477.643.954.510
Beban Administrasi dan Umum (Catatan 28)	65.328.212.726	58.741.548.592
Total	**601.665.264.609**	**536.385.503.102**

Pada tahun 2025, terdapat pengurangan pada aset tetap sebesar Rp8.107.903.554. Pengurangan tersebut merupakan pembebanan terhadap aset dalam konstruksi yang dibebankan dan tidak termasuk bagian dalam aset tetap.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan hasil penilai independen yang telah terdaftar di OJK oleh KJPP Edi Andesta dan Rekan sebagaimana tertera dalam laporan No. 033/SKR-ANDESTA/IV/2026, tanggal 8 April 2026, dari nilai buku atas 53 Armada Kapal per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.529.842.330.644, nilai wajar seluruhnya sebesar Rp1.372.777.000.000 sehingga terdapat penurunan nilai aset tetap - kapal per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.065.330.644.

Aset dalam konstruksi terdiri dari peningkatan dermaga di Ketapang, Bakauheni, Ambon, Kupang, Pembangunan Hotel Meruorah Tahap II dan *Multifunction* di kawasan Marina Labuan Bajo. Jangka waktu penyelesaian pembangunan tersebut berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Pada 31 Desember 2025, persentase penyelesaian dari berkisar antara 10% sampai dengan 98%.

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Pada tahun 2025, Grup melakukan beberapa reklasifikasi, yaitu:

a. Properti investasi menjadi aset tetap untuk tanah sebesar Rp13.338.950.000 (Catatan 11);
b. Aset dalam konstruksi menjadi aset tetap untuk peralatan kantor dengan harga perolehan sebesar Rp16.648.813.756 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp3.651.648.552
c. Aset tetap menjadi properti investasi untuk tanah dan bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp1.056.642.288 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp46.479.414 (Catatan 11).

Aset tetap grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Central Asia (ACA) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp29.400.000.000 dan Rp1.380.893.034.994 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Civil Engineering Completed Risk (CECR) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.006.452.248 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Aset tetap grup juga diasuransikan kepada PT Asuransi Wahana Tata dengan nilai pertanggungan sebesar Rp353.161.436.808 dan Rp713.517.171.436 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Manajemen berkeyakinan jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Aset tetap Grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap segala risiko masing-masing dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp8.191.955.722.512 untuk periode 31 Desember 2024. Manajemen berkeyakinan jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan

Entitas Anak - PT Jembatan Nusantara

Pada tanggal 13 Februari 2025 melalui surat No. 001/KU.111/DK/II/JN-2025 Perusahaan mengajukan permohonan pembatalan polis asuransi marine hull atas 53 kapal yang dimiliki Perusahaan kepada PT Asuransi Central Asia (ACA). Permohonan tersebut kemudian disetujui oleh ACA melalui surat No. 011/BDII/II/2025/L tanggal 17 Februari 2025 sehingga sejak tanggal persetujuan tersebut hingga diterbitkannya laporan keuangan Perusahaan aset kapal yang dimiliki oleh Perusahaan tidak lagi tercover dalam perlindungan asuransi.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Entitas Anak - PT Jembatan Nusantara (lanjutan)

Terdapat 30 aset tetap-kapal yang berada dalam kondisi tidak beroperasi yang disebabkan masih berada di galangan kapal (docking), dan/atau menunggu docking pada tanggal pelaporan, sehingga manajemen telah melakukan penilaian atas penurunan nilai aset tersebut.

Sebagian aset tetap kapal Perusahaan dijadikan sebagai jaminan utang bank (Catatan 20).

Manajemen berkeyakinan bahwa selain aset tetap - kapal, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap untuk kelompok jenis aset yang lain, sehingga manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025

Sebagian aset tetap digunakan sebagai jaminan atas Pinjaman Sindikasi (Catatan 21).

13. ASET HAK GUNA

	2025				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Bangunan	21.294.066.325	9.737.935.000	-	-	31.032.001.325
Peralatan Komputer	309.525.353	-	-	-	309.525.353
Kapal	17.348.850.000	-	-	-	17.348.850.000
Kendaraan	11.043.584.754	-	-	-	11.043.584.754
Sub Total	**49.996.026.432**	**9.737.935.000**	**-**	**-**	**59.733.961.432**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	7.787.792.475	5.537.130.832	-	-	13.324.923.307
Peralatan Komputer	34.391.705	103.175.118	-	-	137.566.823
Kapal	10.786.900.000	3.469.770.000	-	-	14.256.670.000
Kendaraan	3.943.490.663	2.825.427.061	-	-	6.768.917.724
Sub Total	**22.552.574.843**	**11.935.503.011**	**-**	**-**	**34.488.077.854**
Nilai Buku	**27.443.451.589**				**25.245.883.578**

13. ASET HAK GUNA (lanjutan)

	2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Bangunan	19.984.246.067	10.064.064.911	(8.754.244.653)	-	21.294.066.325
Peralatan Komputer	125.353.942.862	309.525.353	-	(125.353.942.862)	309.525.353
Kapal	17.348.850.000	-	-	-	17.348.850.000
Kendaraan	7.061.014.561	3.982.570.193	-	-	11.043.584.754
Sub Total	**169.748.053.490**	**14.356.160.457**	**(8.754.244.653)**	**(125.353.942.862)**	**49.996.026.432**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	10.331.288.783	6.210.748.345	(8.754.244.653)	-	7.787.792.475
Peralatan Komputer	102.372.571.900	23.015.762.667	-	(125.353.942.862)	34.391.705
Kapal	7.317.130.000	3.469.770.000	-	-	10.786.900.000
Kendaraan	1.344.652.620	2.598.838.043	-	-	3.943.490.663
Sub Total	**121.365.643.303**	**35.295.119.055**	**(8.754.244.653)**	**(125.353.942.862)**	**22.552.574.843**
Nilai Buku	**48.382.410.187**				**27.443.451.589**

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Liabilitas Sewa		
Tidak lebih dari 1 tahun	9.049.640.136	15.260.237.307
Lebih dari 1 tahun	3.509.654.175	10.638.362.442
Total	**12.559.294.311**	**25.898.599.749**
Dikurangi Bagian Bunga	(1.234.269.285)	(2.872.413.011)
Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum	**11.325.025.026**	**23.026.186.738**
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(6.581.101.566)	(13.934.482.121)
Bagian Jangka Panjang	**4.743.923.460**	**9.091.704.617**

Beban yang timbul untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Bunga atas Liabilitas Sewa (Catatan 30)	3.386.651.577	2.131.600.846
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 27 dan 28)	13.011.138.453	35.295.119.055
Beban terkait Liabilitas Sewa Jangka Pendek	-	6.381.998.069
Total	**16.397.790.030**	**43.808.717.970**

13. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Pada tahun 2024, Grup melakukan reklasifikasi aset hak-guna menjadi aset tetap untuk peralatan kantor senilai Rp125.353.942.862 (Catatan 12).

14. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Lisensi *Software*	43.084.697.558	2.224.328.023	-	45.309.025.581
Sub Total	**43.084.697.558**	**2.224.328.023**	**-**	**45.309.025.581**
Akumulasi Penyusutan				
Lisensi *Software*	20.078.791.153	8.842.621.389	-	28.921.412.542
Sub Total	**20.078.791.153**	**8.842.621.389**	**-**	**28.921.412.542**
Nilai Buku	**23.005.906.405**			**16.387.613.039**

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Lisensi *Software*	33.513.328.562	9.571.368.996	-	43.084.697.558
Sub Total	**33.513.328.562**	**9.571.368.996**	**-**	**43.084.697.558**
Akumulasi Penyusutan				
Lisensi *Software*	13.163.118.341	6.915.672.812	-	20.078.791.153
Sub Total	**13.163.118.341**	**6.915.672.812**	**-**	**20.078.791.153**
Nilai Buku	**20.350.210.221**			**23.005.906.405**

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp8.842.621.389 dan Rp6.915.672.813 (Catatan 28).

15. UTANG USAHA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)	55.216.709.588	78.474.809.180
Pihak Ketiga	401.760.763.227	371.170.594.962
Total	**456.977.472.815**	**449.645.404.142**

15. UTANG USAHA (lanjutan)

Akun ini terutama merupakan utang terkait pengadaan barang dan jasa, serta utang kepada perusahaan pelayaran terkait penjualan tiket terpadu.

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang Rupiah dan tidak ada jaminan yang diberikan yang diberikan oleh Grup atas perolehan utang ini.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	2025	2024
Entitas Anak - IFPRO		
Pajak Pertambahan Nilai	3.769.203.620	2.748.543.036
Pajak Penghasilan		
Pasal 28.a - 2025	2.173.001.722	-
Pasal 28.a - 2024	2.083.203.087	2.083.203.087
Pasal 28.a - 2023	2.396.757.661	2.396.757.661
Pasal 28.a - 2022	1.985.439.894	1.985.439.894
Total	**12.407.605.984**	**9.213.943.678**

b. Utang Pajak

	2025	2024
Perusahaan		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	17.822.647.483	19.772.120.412
Pasal 15	2.475.996.199	2.449.275.133
Pasal 29	1.954.074.122	2.159.699
Pasal 23	1.635.240.696	1.012.470.477
Pasal 25	1.492.640.959	1.764.498.201
Pasal 4 (2)	800.827.694	514.660.627
Pasal 22	386.775.442	547.699.896
Pajak Pertambahan Nilai Masukan (PPN Wapu)	5.762.237.249	7.334.360.968
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	3.518.792.699	3.855.340.744
Sub Total	**35.849.232.543**	**37.252.586.157**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak (lanjutan)

	2025	2024
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	3.126.015.264	3.563.639.306
Pasal 23	583.992.389	88.392.798
Pasal 21	2.635.046.720	216.931.727
Pasal 15	548.256.505	661.458.172
Pasal 22	-	-
Pasal 29	117.352.974	-
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	1.103.298	1.814.938
PB1	702.527.133	584.403.221
Sub Total	**7.714.294.283**	**5.116.640.162**
Jumlah	**43.563.526.826**	**42.369.226.319**

c. Pajak Kini

	2025	2024
Perusahaan		
Pajak Kini	24.302.273.160	24.588.646.720
Pajak Tangguhan	14.951.006.551	14.710.450.536
Sub Total	**39.253.279.711**	**39.299.097.256**
Entitas Anak		
Pajak Kini	147.533.479	-
Pajak Tangguhan	(14.578.952.358)	(14.176.183.227)
Sub Total	**(14.578.952.358)**	**(14.176.183.227)**
Konsolidasian		
Pajak Kini	24.449.806.639	24.588.646.720
Pajak Tangguhan	372.054.193	534.267.309
Total	**24.821.860.832**	**25.122.914.029**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Konsolidasian	310.252.253.125	472.428.881.489
Dikurangi: Laba (Rugi) Entitas Anak Sebelum Beban Pajak	(229.494.836.768)	(21.095.170.129)
Disesuaikan dengan Jurnal Eliminasi Konsolidasian	(29.835.639.732)	(68.021.942.777)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	**569.582.729.625**	**561.545.994.395**
Koreksi Non Final		
Beda Tetap		
Beban Pajak	52.918.074.752	100.210.754.064
Sumbangan	4.904.217.693	10.762.041.158
Denda Pajak	12.034.640.690	650.858.762
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi - Bersih	(8.823.982.648)	(6.647.453.790)
Pendapatan Denda/Klaim/Pinalti	(15.696.740.005)	(21.764.930.161)
Beban Jasa Administrasi Bank	(1.913.276.653)	-
Pendapatan Selisih Stock Opname	(3.255.848.718)	-
Beban Lainnya	-	-
Jumlah Beda Tetap	**40.167.085.111**	**83.211.270.033**
Beda Waktu		
Penyusutan Aset Tetap	(54.865.419.151)	(54.897.714.320)
Penyusutan Aset Hak-Guna	7.714.659.064	33.546.229.277
Liabilitas Sewa	(22.187.868.253)	(38.170.765.484)
Beban imbalan paska kerja (IPK) PSAK 219	(18.946.417.098)	(29.745.275.227)
Beban penyisihan piutang usaha	22.213.267.533	22.401.841.499
Jumlah Beda Waktu	**(66.071.777.905)**	**(66.865.684.255)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

	2025	2024
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final		
Beban Pokok Penyeberangan	1.827.060.114.751	1.720.491.113.666
Beban Usaha Penyeberangan	507.389.606.680	531.938.894.020
Beban Non Usaha	21.890.277.777	1.268.337.299
Pendapatan Jasa Administrasi Bank	390.201.476	-
Pendapatan Penyeberangan	(2.667.875.369.461)	(2.590.761.938.126)
Pendapatan Usaha Aneka Jasa atas Sewa	(31.492.748.140)	(37.530.453.178)
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	(90.575.241.938)	(91.530.956.915)
Jumlah Pendapatan - Dikenakan PPh Final	**(433.213.158.855)**	**(466.125.003.234)**
Penghasilan Kena Pajak	**110.464.877.976**	**111.766.576.930**
Penghasilan Kena Pajak - Dibulatkan	**110.464.878.000**	**111.766.576.000**
PPH Badan Terutang		
22% X Rp		
Beban Pajak Kini	**24.302.273.160**	**24.588.646.720**
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka		
Pasal 22	889.360.656	453.990.331
Pasal 23	3.547.146.886	2.958.518.290
Pasal 25	17.911.691.496	21.173.978.400
Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar di Muka	**22.348.199.038**	**24.586.487.021**
Utang Pajak Penghasilan - Perusahaan	1.954.074.122	2.159.699
Utang Pajak Penghasilan - Entitas Anak	117.352.974	-
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	**2.071.427.096**	**2.159.699**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

	2024	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Reklasifikasi	2025
Aset Pajak Tangguhan					
Entitas Anak					
Penyusutan Aset Tetap	(1.701.893.703)	(136.272.671)	-	-	(1.838.166.374)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	326.971.420	131.522.803	8.681.583	-	467.175.806
Penyisihan Piutang	1.435.933.081	-	-	-	1.435.933.081
Total Aset Pajak Tangguhan	**61.010.798**	**(4.749.868)**	**8.681.583**	**-**	**64.942.513**
Liabilitas Pajak Tangguhan					
Perusahaan					
Penyisihan Piutang	15.422.432.819	4.471.703.447	-	-	19.894.136.266
Aset Tetap	(69.577.093.298)	(12.070.392.213)	-	-	(81.647.485.511)
Aset Hak Guna	12.628.172.531	1.697.224.994	-	-	14.325.397.525
Liabilitas Sewa	(15.742.109.214)	(4.881.331.016)	-	-	(20.623.440.230)
Liabilitas Imbalan Kerja	24.971.090.370	(4.168.211.762)	1.216.537.509	-	22.019.416.117
Sub Total	**(32.297.506.792)**	**(14.951.006.550)**	**1.216.537.509**	**-**	**(46.031.975.833)**
Entitas Anak					
Selisih Nilai Wajar Kombinasi Bisnis	(35.842.926.216)	14.575.020.643	-	-	(21.267.905.573)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(68.140.433.008)**	**(375.985.907)**	**1.216.537.509**	**-**	**(67.299.881.406)**

	2024	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Reklasifikasi	2025
Aset Pajak Tangguhan					
Entitas Anak					
Penyusutan Aset Tetap	(1.569.026.910)	(132.866.793)	-	-	(1.701.893.703)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	314.281.285	116.836.191	(104.146.056)	-	326.971.420
Penyisihan Piutang	1.122.635.590	313.297.491	-	-	1.435.933.081
Total Aset Pajak Tangguhan	**(132.110.035)**	**(49.853.952.589)**	**(49.853.952.589)**	**(49.853.952.589)**	**61.010.798**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

	2024	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Reklasifikasi	2025
Perusahaan					
Penyisihan Piutang	10.494.027.689	4.928.405.130	-	-	15.422.432.819
Aset Tetap	(57.499.596.148)	(12.077.497.150)	-	-	(69.577.093.298)
Aset Hak-Guna	5.248.002.091	7.380.170.440	-	-	12.628.172.531
Liabilitas Sewa	(7.344.540.808)	(8.397.568.407)	-	-	(15.742.109.214)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	30.489.635.208	(6.543.960.550)	1.025.415.712	-	24.971.090.370
Sub Total	**(18.612.471.967)**	**(14.710.450.537)**	**1.025.415.712**	**-**	**(32.297.506.792)**
Entitas Anak					
Selisih Nilai Wajar Kombinasi Bisnis	(49.721.842.554)	13.878.916.338	-	-	(35.842.926.216)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(68.334.314.521)**	**(831.534.199)**	**1.025.415.712**	**-**	**(68.140.433.008)**

e. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Konsolidasian	310.252.253.125	472.428.881.480
Laba (Rugi) Entitas Anak Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(229.494.836.768)	(21.095.170.129)
Disesuaikan dengan Jurnal Eliminasi Konsolidasi	(29.835.639.732)	(68.021.942.777)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Rekonsiliasi (lanjutan)

	2025	2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	569.582.729.625	561.545.994.386
Laba Sebelum Pajak Setelah Pembulatan	569.582.730.000	561.545.994.000
Tarif Pajak yang Berlaku	22%	22%
Pajak Penghasilan Sesuai Tarif Pajak yang Berlaku	125.308.200.600	123.540.118.680
Pengaruh Pajak atas Beda Tetap	8.836.758.724	18.306.479.407
Pengaruh Pajak atas Beda Waktu	(14.951.006.551)	(14.710.450.536)
Pengaruh Pajak atas Pengaruh Koreksi Pajak Final	(95.306.895.025)	(102.547.500.831)
Beban Pajak Kini - Perusahaan	24.302.273.160	24.588.646.720
Beban Pajak Tangguhan - Perusahaan	14.951.006.551	14.710.450.536
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	39.253.279.711	39.299.097.256
Beban Pajak Kini - Entitas Anak	147.533.479	-
Beban Pajak Tangguhan - Entitas Anak	(14.578.952.358)	(14.176.183.227)
Beban Pajak Penghasilan	**24.821.860.832**	**25.122.914.029**

f. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Selama tahun 2025 Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar atas PPh 21 tahun fiskal 2020 sebesar Rp202,812,451, tahun fiskal 2021 sebesar Rp530.541.919, tahun fiskal 2023 sebesar Rp405.592.991, tahun fiskal 2024 Rp180.623.604.

Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar atas PPh 22 tahun fiskal 2023 sebesar Rp10.180.800, PPh 23 tahun 2023 sebesar Rp4.595.500, PPh Pasal 4 (2) tahun fiskal 2023 sebesar Rp1.995.866.452, PPh 15 tahun fiskal 2023 sebesar Rp33.516.212, STP atas PPh 25/29 tahun fiskal 2023 sebesar Rp7.926.042.175 dan PPN sebesar Rp744.868.586.

17. UTANG ASURANSI

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)		
PT Jasa Raharja (Persero)	5.014.593.620	4.937.337.274
PT Jasa Raharja Putera	21.839.480.747	20.898.891.608
Total	**26.854.074.367**	**25.836.228.882**

17. UTANG ASURANSI (lanjutan)

Akun ini merupakan utang kepada perusahaan asuransi terkait dengan asuransi kecelakaan penumpang, kendaraan bermotor dan barang-barang yang diseberangkan, serta barang lainnya yang dipertanggungkan.

18. BEBAN AKRUAL DAN PROVISI

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Akrual		
Umum	284.046.052.446	248.845.857.727
Administrasi Kantor	19.841.402.896	12.340.812.781
Kepelabuhanan	48.797.650	48.797.650
Lain-lain	819.791.667	819.791.667
Sub Total	**304.756.044.659**	**262.055.259.825**
Provisi (Catatan 33.a dan 33.b)	76.500.000.000	97.152.170.368
Total	**381.256.044.659**	**359.207.430.193**

19. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)	**756.517.767**	**13.407.658.513**
Pihak Ketiga		
Sales Channel	63.039.624.138	38.506.171.492
Asuransi dan Kesejahteraan Karyawan	4.226.944.597	8.069.235.625
Utang Pelayaran	8.397.977.137	14.511.633.164
Uang Jaminan	8.226.802.817	8.003.462.947
Lain-lain	37.308.736.573	35.059.527.254
Sub Total	**121.200.085.262**	**104.150.030.482**
Total	**121.956.603.029**	**117.557.688.995**

20. UTANG BANK

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Bank Jangka Pendek		
Kredit Modal Kerja		
Entitas Anak - JN		
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	-	23.836.020.000
Total	**-**	**23.836.020.000**
Utang Bank Jangka Panjang		
Kredit Investasi		
Perusahaan		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	225.000.000.000	375.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	122.655.500.000	147.218.500.000
Sub Total	**347.655.500.000**	**522.218.500.000**
Entitas Anak - JN		
Pihak Berelasi		
Pokok Utang		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	85.683.372.789	115.350.317.294
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	32.395.531.905	66.600.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	6.999.999.999
Bunga Ditangguhkan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.665.585.933
Sub Total	**118.078.904.694**	**190.615.903.226**
Total	**465.734.404.694**	**712.834.403.226**
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(259.697.547.739)	(263.432.165.478)
Total Utang Bank Jangka Panjang	**206.036.856.955**	**449.402.237.748**

20. UTANG BANK (lanjutan)

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si., di Jakarta, tanggal 21 Maret 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *Term Loan* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp159.500.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku delapan tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 18 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7,25% per tahun untuk tahun pertama dan kedua, serta sebesar *reference rate* (JIBOR 3M) ditambah margin (0,75% per tahun) untuk tahun ketiga sampai dengan fasilitas kredit berakhir. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai peningkatan kapasitas Dermaga II di Pelabuhan Merak dan peningkatan kapasitas dermaga Ponton menjadi *Moveable Bridge* di Pelabuhan Gilimanuk. Perjanjian kredit ini tidak dijamin secara preferen dengan agunan kebendaan, pendapatan atau aktiva lain dalam bentuk apapun.

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perusahaan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 150%, dan menjaga *Debt Service Coverage Ratio* diatas 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan:

- Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan;
- Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan yang wajar;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar
- Menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain kecuali aset yang telah dijaminkan sebelumnya kepada kreditur eksisting.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp122.655.500.000 dan Rp147.218.500.000 Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.563.000.000 dan Rp12.280.500.000.

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1-4 yang dibuat dihadapan Notaris Sriyani Burlian, S.H di Jakarta tanggal 25 Mei 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Transaksi Khusus dengan batas maksimum kredit sebesar Rp975.000.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku lima tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 12 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7% per tahun. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai transaksi dengan PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP terkait akuisisi 100% saham PT Jembatan Nusantara, pelunasan kapal afiliasi dan pengalihan kapal, dan *refinancing shareholder* atas pelunasan pinjaman kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk dan PT Chandra Sakti Utama.

Pinjaman ini dijamin dengan:
- Saham PT Jembatan Nusantara dengan nilai penjaminan Rp873.953.000;
- Deposito giro yang dimiliki dalam bentuk jaminan gadai dengan nilai penjaminan Rp275.000.000.000 (Catatan 10).

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perusahaan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, kolektibilitas fasilitas kredit dalam keadaan lancar, rasio *Debt Equity Ratio* maksimal 150%, dan menjaga rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis Perusahaan tidak diperkenankan:
- Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini;
- Mengagunkan aset Perusahaan termasuk aset JN kecuali aset yang telah dijaminkan pada saat transaksi akuisisi ini dilakukan;
- Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan yang wajar;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
- Mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi secara negatif kelancaran usaha Perusahaan;
- Melakukan divestasi aset/penjualan saham JN;
- Perusahaan dilarang untuk menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp225.000.000.000 dan Rp375.000.000.000. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp150.000.000.000.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN)

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 37 tanggal 29 April 2024 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk operasional JN.

Perjanjian ini telah diaddendum melalui surat No. 60041/GBK/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Kredit : Rp50.000.000.000
Tingkat Bunga : 8,25% per tahun
Jangka Waktu : 3 bulan setelah tanggal penarikan
Tujuan : Modal Kerja

Selama JN belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, perusahaan tidak diperkenankan melakukan:
- Memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali pinjaman atau tambahan pinjaman yang diterima Debitor tersebut tidak menyebabkan Debitor melanggar ketentuan rasio keuangan.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain, kecuali untuk menjamin utang/pinjaman perusahaan yang secara keuangan terkonsolidasi dengan ASDP.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan divestasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.
- Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar.
- Mengubah susunan para pemegang saham, kecuali Debitor melakukan Initial Public Offering (IPO).

Selama JN memiliki fasilitas kredit di BCA, maka JN diwajibkan untuk:
- Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan modal kerja JN.
- Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap JN.
- Memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut JN, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang dapat memengaruhi usaha, keadaan keuangan, dan/atau harta kekayaan JN serta dapat mengganggu kemampuan JN untuk melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat dan ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh JN.
- Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha JN.
- Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
  - Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
  - Laporan keuangan *unaudited* triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Mempertahankan rasio keuangan ASDP konsolidasi berupa:
  - *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* yaitu perbandingan antara kewajiban/utang berbunga terhadap ekuitas maksimal 3 (tiga) kali.
  - *Current Ratio* yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali.
- Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada JN selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan dilakukan.
- JN wajib melunasi seluruh outstanding jumlah terutang yang ada di BCA apabila fasilitas kredit yang diterima ASDP dari BCA diakhiri, dilunasi atau ditutup.

Pada 31 Desember 2025, JN telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jumlah pemakaian fasilitas pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp88.397.676.517. Nilai terutang pada 31 Desember 2025 sebesar nihil. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp134.251.707.002

Berdasarkan surat addendum kedua dengan nomor 464/add-KCK/2025, tanggal 22 Desember 2025, telah dilakukan perpanjangan perjanjian yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2026.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. BNISy/CRD/288/R tanggal 29 Juni 2018, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui akta No 35 tanggal 26 Februari 2026, yang didasari Surat Penawaran Restrukturisasi nomor 06/014-3/SP3/CB1 tanggal 24 Februari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah
Plafon Kredit : Rp85.683.372.789
Nisbah
Bagi Hasil : Bank 33,00% dan Nasabah 67,00%
Jangka Waktu : Sampai dengan 25 Desember 2030
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas Musyarakah Mutanaqisah

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset JN (Catatan 12):
- 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Mahkota Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2296 tanggal 29 Mei 2009 dan Akta Hipotek Pertama No. 17/2018 tanggal 8 Agustus 2018;
- 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Safira Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4947 tanggal 6 Maret 2012 dan Akta Hipotek Pertama No. 50/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:
- Perbandingan antara aset lancar dan utang lancar harus diupayakan minimal 1,0 kali;
- Perbanding antara jumlah utang dengan modal maksimal 2,2 kali;
- Perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran minimal 1,0 kali;
- Tidak menjual atau memindahtangankan aset yang diagunkan/dijaminkan di bank;
- Tidak mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan aset JN yang telah diagunkan/dijaminkan kepada bank;
- Tidak mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
- Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan Addendum Restrukturisasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No 35, tanggal 26 Februari 2026 (Catatan 30), Perusahaan sudah memenuhi rasio keuangan dan pembatasan yang disyaratkan.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp85.683.732.789 dan Rp115.350.317.294. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.666.944.505 dan Rp24.429.222.682.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 8 dan 9 tanggal 8 Maret 2017 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta, JN memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk operasional JN.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami adendum, adapun perubahan terakhir yaitu melalui Akta No. 28 dan 29 tanggal 29 Juni 2021 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp131.800.000.000
Tingkat Bunga : 11,50% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 8 Februari 2025

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
i. Piutang usaha (Catatan 5);
ii. Kapal (Catatan 12); dan
iii. Persediaan (Catatan 8).

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:
- Tidak melakukan merger dan go public;
- Tidak melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan yang menyebabkan kepemilikan saham menjadi minoritas;
- Tidak mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang;
- Tidak memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga lain;
- Tidak melakukan investasi, peluasan usaha atau penjualan aset melebihi Rp100.000.000.000;
- Tidak melakukan pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank;
- Tidak melakukan perlunasan dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di bank dilunasi;
- Tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan pihak berelasi dengan alasan apapun.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, JN telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp6.999.999.999. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.999.9999.999 dan Rp46.800.000.000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.006 tanggal 19 Agustus 2016 dan persetujuan pemberian fasilitas kredit No. SPM/2.1/308/R tanggal 28 Agustus 2016, JN memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian di restrukturisasi melalui akta No. 86 tanggal 14 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp87.550.000.000
Jangka Waktu : Sampai dengan 18 Agustus 2024
Tingkat Bunga : 11,25% per tahun
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Berdasarkan Surat Nomor COB3/5/588 tanggal 24 September 2025 perjanjian kredit dengan nomor ENB/4.1/006/R tanggal 5 Januari 2023 telah lunas per tanggal 28 Agustus 2025.

Berdasarkan perjanjian kredit 009/SPM/PKKI/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian di restrukturisasi melalui akta No. 26 tanggal 10 Februari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp32.395.544.569
Tingkat Bunga : 8,50% per tahun dengan pembebanan 9,00% dan 2,25% ditangguhkan
Jangka Waktu : Sampai dengan 30 Januari 2033
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
i. Piutang usaha (Catatan 5);
ii. Kapal (Catatan 12); dan
iii. Persediaan (Catatan 8).
iv. Tanah dan Bangunan (Catatan 9).

JN diwajibkan untuk menjaga *current ratio* minimal 1 kali, *debt equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan *debt service coverage* minimal 100,00%.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis PT Jembatan Nusantara tidak diperkenankan:

- Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain;
- Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham;
- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan kepailitan;
- Mengubah bidang usaha;
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan atau kewajiban saudara yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
- Menarik kembali modal yang disetor;
- Merubah bentuk atau status hukum JN, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) berupa memindahtangankan saham JN baik antar pemegang saham maupun kepada kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan;
- Menjual atau menjaminkan harta kekayaan JN kepada pihak lain termasuk unit-unit kapal yang belum menjadi jaminan/agunan di bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Menerima fasilitas kredit kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya;
- Melakukan marger akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan kepada JN lain;
- Melakukan investasi yang melebihi proceed JN;
- Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham JN kepada pihak manapun;
- Melakukan interfinancing dengan JN afiliasi, induk JN dan atau anak JN kecuali yang berhubungan dengan operasional JN;
- Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
- Melunasi selusuh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI;
- Melunasi atau membayar pokok atau biaya bunga dan atau biaya-biaya lainya atas pinjaman kepada pihak yang telah disetujui atau ditetapkan dalam perjanjian kredit, akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan atau afiliasinya;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim atau wajar berdasarkan penilaian BNI.

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No (03) 009/SPM-KI/2019, tanggal 10 Februari 2026 Perusahaan sudah memenuhi rasio keuangan dan pembatasan yang disyaratkan.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.395.546.905 dan Rp68.265.585.933. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp35.870.039.034 dan Rp46.546.757.817.

21. PERJANJIAN SINDIKASI

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pinjaman Sindikasi Jangka Panjang		
Entitas Anak - IFPRO		
Pihak Berelasi (Catatan 31)		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	94.000.000.000	98.000.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	550.400.000.000	580.700.000.000
Sub Total	**644.400.000.000**	**678.700.000.000**
Dikurangi: Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(12.336.623.851)	(13.497.582.184)
Total	**632.063.376.149**	**665.202.417.816**
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(44.400.000.000)	(34.300.000.000)
Bagian Jangka Panjang	**587.663.376.149**	**630.902.417.816**

Perjanjian Sindikasi

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 pada tanggal 18 Desember 2023 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, IFPRO memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") pihak ketiga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI"), pihak berelasi dengan *limit* kredit fasilitas sebesar Rp705.000.000.000 dengan *outstanding* sebagai berikut:

	Plafond	2025	2024
BCA			
Tranche I.A	200.000.000.000	188.000.000.000	196.000.000.000
Tranche I.B	100.000.000.000	94.000.000.000	98.000.000.000
Tranche III	305.000.000.000	268.400.000.000	286.700.000.000
LPEI			
Tranche I.C	100.000.000.000	94.000.000.000	98.000.000.000
Total	**705.000.000.000**	**644.400.000.000**	**678.700.000.000**

21. PERJANJIAN SINDIKASI (lanjutan)

IFPRO wajib menggunakan Fasilitas sesuai dengan tujuan pinjaman, yaitu:

a) Fasilitas Kredit Investasi I:

i. Tranche I.A, Fasilitas ini digunakan untuk melakukan pelunasan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Eksisting dan/atau pelunasan Fasilitas Kredit Eksisting yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial di Kawasan Wisata Labuan Bajo dengan suku bunga 7,75%.
ii. Tranche I.B, Fasilitas ini digunakan untuk pelunasan Pinjaman Pemegang Saham Eksisting yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial di Kawasan Wisata Labuan Bajo dengan suku bunga 7,50%.
iii. Tranche I.C, Fasilitas ini digunakan untuk pelunasan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Eksisting dan/atau pelunasan Hutang kepada Kontraktor yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial Bajo di Kawasan Wisata Labuan bajo dengan suku bunga 6%.

b) Fasilitas Kredit Investasi III:

Fasilitas ini akan digunakan pembayaran kembali dengan menggunakan fasilitas baru *(refinancing)* Fasilitas Kredit Eksisting, baik secara *take over* maupun yang telah dilunasi menggunakan pinjaman pemegang saham yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni dengan suku bunga 7,75%.

Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah maksimal 12 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi I adalah 144 bulan sejak tanggal perjanjian.
- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi *Tranche* II adalah 180 bulan sejak tanggal perjanjian.
- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi *Tranche* III adalah 144 bulan sejak tanggal perjanjian.

Antara IFPRO dengan PT Bank Central Asia Tbk, dijamin dengan:
- Gadai Atas Rekening Penampungan.
- Kuasa untuk Mengelola dan Melakukan Penarikan dari Rekening. Kuasa untuk yang diberikan IFPRO kepada BCA atas rekening yang digadaikan, sebagai berikut:
  1. Rekening Pengumpulan *(Collection Account)* nomor 2050050109
  2. Rekening Proyek (*Project Account*) nomor 2050050206
  3. Rekening Pembayaran Utang (*Debt Service Account*) nomor 2050050192
  4. Rekening Cadangan Pembayaran Utang (*Debt Service Reserve Account*) nomor 2050050176
  5. Rekening Penjaminan Kredit (*Credit Guarantee Account*) nomor 2050050184
  6. Rekening Operasional nomor 2050050087
     - *Cessie* piutang sebagai jaminan atas hak dalam perjanjian kerja sama.
     - Kuasa untuk menjual aset berupa bangunan di Merak, Bakauheni serta Labuan Bajo.

21. PERJANJIAN SINDIKASI (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, IFPRO harus menjaga rasio keuangan berikut yang harus dipenuhi 12 tahun setelah penandatanganan perjanjian kredit ini yaitu:

a) Debitur harus memastikan bahwa:
   i. Rasio Utang terhadap Ekuitas dari Debitur tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali;
   ii. Rasio Lancar dari Debitur tidak boleh kurang dari 1 (satu) kali; dan
   iii. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dari Debitur tidak boleh kurang dari 1 (satu) kali.

b) Debitur wajib mempertahankan ekuitas tetap positif.

Pada tanggal 31 Desember 2025, IFPRO telah mematuhi seluruh hal-hal yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Total liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing dihitung oleh Konsultan Aktuaris Independen.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dana Pensiun	437.114.028	31.163.186.450
Imbalan Pascakerja	106.206.795.096	86.144.865.062
Total Liabilitas	**106.643.909.124**	**117.308.051.512**

a) Dana Pensiun

Program Pensiun Iuran Pasti

Biaya pensiun iuran pasti masing-masing pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.178.786.639 dan Rp8.241.274.302 yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI untuk kompensasi pensiun pegawai.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk sebagian besar karyawan yang memenuhi persyaratan. Program dana pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang peraturannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Program dana pensiun memberikan imbalan pascakerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Jumlah karyawan Perusahaan peserta dana pensiun masing-masing adalah 875 dan 1.027 pada 31 Desember 2025 dan 2024.

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

a) Dana Pensiun (lanjutan)

Liabilitas program pensiun manfaat pasti karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Nilai Kini Liabilitas	358.797.297.057	348.893.612.078
Nilai Wajar Aset Program	(358.360.183.029)	(317.730.425.628)
Liabilitas yang Diakui	**437.114.028**	**31.163.186.450**

Mutasi atas nilai kini liabilitas program pensiun manfaat pasti karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	348.893.612.078	321.244.714.267
Perubahan yang Dibebankan ke Laba Rugi:		
Biaya Jasa Kini	5.219.833.743	5.651.156.800
Biaya Bunga	23.630.085.861	21.303.310.491
	28.849.919.604	**26.954.467.291**
Pengukuran Kembali Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain:		
Efek Perubahan dari Asumsi Demografik	-	(453.459.712)
Efek Perubahan dari Asumsi Keuangan	3.387.577.796	(1.120.207.884)
Efek Perubahan dari Penyesuaian Pengalaman	2.052.673.742	24.489.737.924
	5.440.251.538	**22.916.070.328**
Pembayaran Imbalan	(24.386.486.164)	(22.221.639.808)
Saldo Akhir	**358.797.297.056**	**348.893.612.078**

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

a) Dana Pensiun (lanjutan)

Mutasi atas nilai wajar aset program Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	(317.730.425.628)	(294.182.785.658)
Perubahan yang Dibebankan ke Laba Rugi:		
Penghasilan Bunga	(21.542.152.369)	(19.544.285.132)
	(21.542.152.369)	**(19.544.285.132)**
Pengukuran Kembali Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain:		
Imbal Hasil atas Aset Program	11.499.131.842	8.993.693.286
	11.499.131.842	**8.993.693.286**
Iuran Pemberi Kerja	(31.974.959.354)	(35.218.687.932)
Pembayaran Manfaat	24.386.486.164	22.221.639.808
Saldo Akhir	**(335.361.919.345)**	**(317.730.425.628)**

b) Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan pascakerja dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Nilai Kini Liabilitas	106.206.795.096	86.144.865.062
Nilai Wajar Aset	-	-
Liabilitas yang Diakui	**106.206.795.096**	**86.144.865.062**

Beban imbalan pascakerja Grup dialokasikan pada beban produksi dan beban usaha sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Biaya Jasa Kini	11.097.489.920	9.207.242.405
Biaya Bunga	5.788.006.248	6.841.607.842
Biaya Jasa Lalu	1.573.347.016	(1.061.598.308)
Kurtailmen	-	(2.012.925.547)
Beban Diakui	**18.458.843.184**	**12.974.326.392**

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

b) Imbalan Pasca Kerja

Perubahan liabilitas imbalan pascakerja dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Liabilitas Awal Tahun	86.144.865.062	117.259.041.731
Pembayaran Imbalan	(21.740.260.831)	(15.590.032.046)
Beban Tahun Berjalan	30.167.101.710	12.974.326.392
Penghasilan Komprehensif Lain	11.635.089.155	(28.498.471.015)
Liabilitas Akhir Tahun	**106.206.795.096**	**86.144.865.062**

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	49.602.034.071	78.100.505.086
Dampak Perubahan Asumsi Keuangan	39.461.739	(3.337.182.789)
Dampak Penyesuaian Pengalaman	7.031.162	(25.161.288.226)
Dampak Penyesuaian Demografik	-	-
Saldo Akhir Tahun	**49.648.526.972**	**49.602.034.071**

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

a. Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

b. Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

b) Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Analisa Sensitivitas

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisa sensitivitas di bawah ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

	2025		2024	
	Dana Pensiun	Imbalan Pascakerja	Dana Pensiun	Imbalan Pascakerja
Analisa Sensivitas Tingkat Diskonto				
Jika Tingkat +1%	354.077.339.212	85.738.961.593	343.637.790.574	74.410.136.220
Jika Tingkat -1%	363.866.005.894	116.177.547.005	354.558.848.898	100.001.908.917
Analisa Sensivitas Kenaikan Gaji				
Jika Tingkat +1%	364.478.698.154	116.974.274.669	355.258.409.673	100.762.591.781
Jika Tingkat -1%	353.418.670.708	84.849.752.904	342.892.801.655	73.589.955.281

Profil Jatuh Tempo Pembayaran Imbalan Pascakerja adalah:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Nilai Kini Manfaat Diharapkan akan Dibayar di:		
- sampai dengan 2 tahun	18.742.581.047	15.667.190.865
- 2 sampai dengan 5 tahun	13.598.585.827	11.827.171.607
- 5 sampai dengan 10 tahun	27.315.184.753	21.757.549.295
- diatas 10 tahun	46.550.443.469	36.892.953.295

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Usia pensiun	56 tahun	56 tahun
Tingkat kematian	GGAM - 1971 (ASDP, IFPRO and JN: TMI IV)	GGAM - 1971 (ASDP, IFPRO and JN: TMI IV)
Tingkat cacat:		
Usia 20 - 55 tahun	0,01% (JN: 10% dari TMI IV)	0,01% (JN: 10% dari TMI IV)

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

b) Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tingkat pengunduran diri:		
Usia 18 - 45 tahun	4% per tahun	4% per tahun
Usia 46 - 55 tahun	10% pada usia 46, turun 1% linier sampai usia 55	10% pada usia 46, turun 1% linier sampai usia 55
Kenaikan Gaji	6% per tahun (IFPRO: 8% per tahun, JN: 4% per tahun)	6% per tahun (IFPRO: 8% per tahun, JN: 4% per tahun)
Tingkat Diskonto	5,97% per tahun (IFPRO: 6,93% per tahun, JN: 7,12% per tahun)	5,97% per tahun (IFPRO: 6,93% per tahun, JN: 7,12% per tahun)
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*

23. MODAL SAHAM

Sesuai dengan Akta No. 20 tanggal 23 Juni 2025 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0303880 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang perubahan nama pemegang saham perseroan yang sebelumnya adalah perusahaan perseroran (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management.

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2025			
	Saham (Lembar)	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Kepemilikan (%)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)
PT Danantara Asset Management	5.561.759	1.000.000	99,99%	5.561.759.000.000
Negara Republik Indonesia	1	1.000.000	0,01%	1.000.000
			TOTAL	**5.561.760.000.000**

Pemegang Saham	31 Desember 2024			
	Saham (Lembar)	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Kepemilikan (%)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)
Negara Republik Indonesia	5.561.760	1.000.000	100	5.561.760.000.000

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 2 Juli 2024 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0039757.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024, Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp388.565.000.000 (388.565 lembar saham) yang berasal dari tambahan modal disetor dan Penggunaan Saldo Laba (Catatan 24 dan 25).

Mutasi lembar saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah Saham Awal Tahun	5.561.760	5.173.195
Penambahan	-	388.565
Jumlah Saham Akhir Tahun	**5.561.760**	**5.561.760**

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Pengalihan Aset Perum		
Saldo Awal	7.741.162.065	7.741.162.065
Pemindahan ke Modal Saham	-	-
Sub Total	**7.741.162.065**	**7.741.162.065**
b. Pengampunan Pajak		
Aset Tetap - Kendaraan	594.200.000	594.200.000
Aset Tetap - Tanah dan Bangunan	110.000.000	110.000.000
Sub Total	**704.200.000**	**704.200.000**
c. Penyertaan Modal		
Aset Tetap - Kapal	-	388.564.810.000
Pemindahan ke Modal Saham (Catatan 23)	-	(388.564.810.000)
Sub Total	**-**	**-**
Total	**8.445.362.065**	**8.445.362.065**

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak No. 09300001103 tertanggal 4 Januari 2017, dengan uang tebusan yang dibayarkan ke kas negara sebesar Rp35.210.000 dan tambahan harta yang dilaporkan untuk Program Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp704.200.000.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 67 Tahun 2023 tentang penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan menerima 12 unit kapal senilai Rp388.564.810.000.

25. PENGGUNAAN SALDO LABA

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 4 Juni 2024, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp438.744.684.039 dan 613.449.069.695.

Mutasi penggunaan saldo laba laba yang ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	2.413.803.355.650	1.831.026.929.440
Laba Bersih Periode Lalu	438.744.684.039	613.449.069.695
Reklasifikasi ke Modal Disetor	-	(190.000)
Pembagian Dividen Tunai	(44.964.111.493)	(30.672.453.485)
Saldo Akhir	**2.807.583.928.196**	**2.413.803.355.650**

26. PENDAPATAN USAHA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyeberangan dan Lintas Perintis	3.109.897.045.967	3.237.559.962.732
Pelabuhan	1.234.969.760.124	1.171.851.359.127
Aneka Jasa dan Kerjasama	617.597.832.153	615.147.504.305
Total	**4.962.464.638.244**	**5.024.558.826.164**

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyeberangan dan Lintas Perintis	2.420.649.477.447	2.267.587.794.127
Pelabuhan	407.010.195.255	534.895.886.610
Aneka Jasa dan Kerjasama	749.357.713.948	595.120.181.817
Total	**3.577.017.386.650**	**3.397.603.862.554**

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Termasuk dalam beban pokok pendapatan, beban penyusutan aset tetap dan aset hak-guna, kerugian penghapusan aset tetap serta beban gaji dan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Gaji dan Tunjangan	621.287.138.001	630.900.759.864
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 12)	536.337.051.883	477.643.954.510
Beban Kerugian Penghapusan Aset Tetap (Catatan 12)		1.450.453.444
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 13)	7.331.378.563	7.045.007.768
Total	**1.164.955.568.447**	**1.117.040.175.586**

28. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gaji dan Tunjangan	509.058.394.873	475.508.803.655
Jasa Profesional	140.119.493.658	114.447.838.022
Pemeliharaan	84.497.398.076	61.046.123.228
Pajak	70.839.947.238	80.840.579.128
Penyusutan (Catatan 12)	65.328.212.726	58.741.548.592
Perjalanan Dinas	64.275.628.163	55.793.819.987
Telekomunikasi dan Perlengkapan Kantor	44.514.852.553	48.303.479.429
Representasi, Jamuan dan Sumbangan	36.426.310.797	28.666.025.731
Penurunan Nilai Piutang (Catatan 5, 7 dan 10)	20.168.837.938	27.656.782.592
Pendidikan dan Pelatihan	18.132.178.361	20.900.639.028
BBM, Listrik, dan Air	15.282.767.142	16.266.990.926
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	10.182.808.832	8.085.674.794
Amortisasi (Catatan 14)	8.842.621.389	6.915.672.812
Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 13)	5.679.759.890	28.250.111.287
Lain-lain (Dibawah Rp4 Milyar)	9.134.509.197	31.588.649.852
Total	**1.102.483.720.833**	**1.063.012.739.063**

29. PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Lainnya		
Pendapatan Non Usaha Lainnya	34.310.189.497	37.418.987.539
Denda/Klaim/Pinalti	31.105.986.776	29.840.892.161
Pemulihan Nilai Piutang (Catatan 5 dan 7)	23.297.605.180	24.339.094.181
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi (Catatan 11)	11.193.982.648	1.921.053.790
Laba Selisih Kurs	1.913.276.653	-
Total	**101.821.040.754**	**93.520.027.671**
Beban Lainnya		
Denda Pajak	13.427.519.039	653.783.469
Denda/Klaim/Pinalti	9.256.890.140	88.254.704.554
Beban di Luar Usaha Lainnya	7.551.308.813	8.197.929.260
Rugi Selisih Kurs	-	16.064.248
Jasa Administrasi Bank	698.292.167	1.412.665.853
Beban Penurunan Nilai (Catatan 12)	-	9.857.030.241
Total	**30.934.010.159**	**108.392.177.625**

30. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Keuangan		
Pendapatan Bunga Deposito	54.296.160.230	50.462.044.259
Pendapatan Jasa Giro	37.698.380.985	26.922.324.023
Total	**91.994.541.215**	**77.384.368.282**
Beban Keuangan		
Beban Bunga Pinjaman Bank	63.501.122.473	76.151.188.059
Beban Bunga Utang Pembiayaan	32.034.159.885	37.135.895.687
Bunga Aset Hak-Guna (Catatan 13)	3.386.651.577	2.131.600.846
Beban Bunga Pinjaman kepada Kepentingan Non Pengendali	-	-
Total	**98.921.933.935**	**115.418.684.592**

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas/ Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan	
	2025	2024	2025	2024
Bank (Catatan 4)				
Rupiah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	347.641.313.038	281.769.139.882	3,00	2,47
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	32.941.429.792	157.984.472.927	0,33	1,38
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	542.249.923.473	151.546.064.680	4,70	1,33
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.411.148.856	149.130.976.441	0,33	1,31
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	76.233.511.977	63.926.809.388	0,66	0,56
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.466.054.149	1.408.130.895	0,02	0,01
Euro				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.298.433	8.248.383	0	0
Total	**1.039.950.679.718**	**805.773.842.596**	**9,04**	**7,06**
Deposito (Catatan 4)				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	310.000.000.000	310.000.000.000	2,68	2,72
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000	1,73	1,75
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90.864.170.000	139.354.470.000	0,43	1,22
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	25.000.000.000	100.000.000.000	0,87	1,1
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000.000.000	125.000.000.000	0,87	0,88
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	10.000.000.000	-	0,87	0,88
Total	**735.864.170.000**	**874.354.470.000**		**7,67**
Piutang Usaha (Catatan 5)				
Kementerian Perhubungan	37.785.607.750	10.357.866.230	0	0,09
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	792.910.237	729.812.547	0,01	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	54.463.179	742.223.411	0	0,01
PT PP (Persero) Tbk	23.367.503		0	0
PT Telkomsel	13.652.743	247.062.373	0	0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.531.012	118.400.907	0	0
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	-	141.105.250	0	0
Lain-lain	157.383.184	371.900.973	0	0
Sub Total	**38.838.915.608**	**12.708.371.691**	**0,01**	**0,11**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(242.619.263)	(814.020.699)	-0,01	-0,01
Total	**38.596.296.345**	**11.894.350.992**	**0,0**	**0,1**

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas/ Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan	
	2025	2024	2025	2024
Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Catatan 7)				
Kementerian Perhubungan	147.994.697.043	138.549.727.451	1,11	1,21
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.932.485.932	25.280.969.345	0,44	0,22
Perum DAMRI	134.868.000	134.868.000	0	0
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	662.149.000	133.113.800	0,01	0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	109.999.047	125.218.728	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	32.925.075	-	0	0
Lain-lain	324.906.092	191.917.778	0,20	0
Sub Total	**200.192.030.189**	**164.415.815.102**	**1,76**	**1,44**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(39.202.909.167)	(19.013.462.138)	-0,34	-0,17
Total	**160.989.121.022**	**145.402.352.964**	**1,42**	**1,27**
Utang Usaha (Catatan 15)				
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	20.318.181.818	35.412.428.198	0,88	1,36
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	8.033.232.000	7.054.387.398	0,35	0,27
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	5.013.302.037	3.970.977.566	0,22	0,15
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	4.449.546.594	5.183.440.101	0,19	0,2
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	4.089.248.874	-	0,18	--
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	3.636.254.178	1.889.678.156	0,16	0,07
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.657.576.225	3.993.812.922	0,07	0,15
PT Dok dan Perkapalan Surabaya	1.406.694.060	-	0,06	0,00
PT Jasa Raharja Putera	1.112.929.151	885.890.320	0,05	0,03
PT PLN (Persero)	759.521.525	1.390.645.271	0,03	0,05
PT Surveyor Indonesia	493.201.575	-	0,02	--
PT Angkasa Pura Support	479.189.432	-	0,02	--
PT Bina Karya (Persero)	287.878.500	620.515.572	0,01	0,02
PT BRI Multifinance Indonesia	286.391.248	663.782.929	0,01	0,03
PT BGR Logistik Indonesia	245.000.000	391.850.000	0,01	0,02
PT Pos Indonesia (Persero)	212.411.054	169.611.254	0,01	0,01
PT Asuransi ASEI Indonesia	180.800.000	-	0,01	--
PT Yodya Karya (Persero)	172.062.500	172.062.500	0,01	0,01
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	-	156.387.300	0,00	0,01
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)		14.063.589.610	0,00	0,54
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		572.522.522	0,00	0,02
PT Amarta Karya (Persero)		1.190.960.000	0,00	0,05
Lain-lain	2.383.288.817	692.267.561	0,10	0,03
Total	**55.216.709.588**	**78.474.809.180**	**2,38**	**3,02**

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas/ Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan	
	2025	2024	2025	2024
Utang Asuransi (Catatan 17)				
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	21.839.480.747	20.898.891.608	0,89	0,8
PT Jasa Raharja Putera	5.014.593.620	4.937.337.274	0,22	0,19
Total	**26.854.074.367**	**25.836.228.882**	**1,11**	**0,99**
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya (Catatan 19)				
Kementeria Perhubungan (pel. Tg. Api Api)	538.818.775	-	0.02	0
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	23.772.724	606.735.669	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	12.600.000.000	0	0,25
Lain-lain	193.926.268	200.922.844	0,01	0
Total	**756.517.767**	**13.407.658.513**	**0,01**	**0,25**
Pinjaman Sindikasi (Catatan 21)				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	94.000.000.000	98.000.000.000	3,88	3,75
Total	**94.000.000.000**	**98.000.000.000**	**3,88**	**3,75**
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya				
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.542.940.176	1.542.940.176	0,06	0,06
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	322.624.767	242.160.000	0,01	0,01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.824.729	45.925.000	--	--
Lain-lain	5.147.100	-	--	--
	1.921.536.772	**1.831.025.176**	**0,07**	**0,07**
Gaji dan Tunjangan				
Dewan Komisaris	14.846.127.911	23.093.750.203	1,3	2,1
Dewan Direksi	22.125.300.000	40.256.332.451	2,0	3,65
	36.971.427.911	**63.350.082.654**	**3,3**	**5,75**
Pendapatan Usaha				
Kementerian Perhubungan	406.015.934.998	364.490.540.544	8,19	7,25
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	9.659.216.044	0	0,19
PT Asuransi Jasa Raharja Putera	29.730.753.454	-	0,60	0,19
PT Patra Logistik	16.897.519.420	-	0,34	0,19
PT Jasa Raharja	6.291.330.867	-	0,13	0,19
PT Elnusa Petrofin	4.052.421.837	-	0,08	0,19
PT Pos Indonesia	702.056.300	-	0,01	0,19
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	466.582.568	-	0,01	0,19
PT Pegadaian	375.480.000	-	0,01	0,19
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	130.217.350	-	0	0,19
Lain-lain	650.119.792	-	0,01	0,19
	465.312.416.586	**374.149.756.588**	**9,38**	**9,15**

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas/ Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan	
	2025	2024	2025	2024
Pembelian				
PT Pertamina (Persero)	1.029.642.937.899	1.034.548.086.399	28,75	30,35
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	14.382.853.842	13.529.661.053	0,4	0,4
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	8.142.301.583	-	0,23	0
	1.052.168.093.324	**1.048.077.747.452**	**29,38**	**30,75**

Hubungan dan jenis akun atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No	Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun atau Transaksi
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Utang Bank, Pendapatan yang Masih Harus Diterima
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Utang Bank
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Utang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima
5	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Utang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Pendapatan Usaha
7	PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha, Utang Asuransi, Utang Usaha
8	Kementerian Perhubungan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Pendapatan Usaha, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

No	Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun atau Transaksi
9	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Pendapatan Klaim
10	PT Jasa Raharja Putera	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pendapatan Usaha, Utang Asuransi
11	Perum DAMRI	Entitas Sepengendali	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
12	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pendapatan Usaha
13	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha, Utang Usaha
14	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
15	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Sepengendali	Liabilitas Lain-lain
16	PT Telkomsel	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
17	PT Telkom Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
18	PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
19	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
20	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
21	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
22	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
23	PT Surveyor Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
24	PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
25	PT Yoda Karya (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
26	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas Sepengendali	Pinjaman Sindikasi
27	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
28	PT PLN (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

No	Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun atau Transaksi
29	Angkasa Pura Suport	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
30	PT BGR Logistik	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
31	PT Asuransi ASEI Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
32	PT Bina Karya (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
33	PT BRI Multifinance Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
34	PT Patra Logistik	Entitas Sepengendali	Pendapatan Usaha
35	PT Elnusa Petrofin	Entitas Sepengendali	Pendapatan Usaha
36	PT Pegadaian	Entitas Sepengendali	Pendapatan Usaha
37	Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Personel Manajemen Kunci	Kompensasi dan Remunerasi

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

	31 Desember 2025		31 Desember 2024	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Mata Uang Asing	Ekuivalen
Aset				
Kas dan Setara Kas				
USD	2.581.946	43.330.224.149	2.522.126	40.762.600.895
EUR	369,48	7.298.433	489,48	8.248.383

33. KONTINJENSI

a) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Dian Sentosa

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 514/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., PT Dian Sentosa mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan penyelesaian pembayaran atas pekerjaan paketisasi peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Merak, Ketapang, Lembar, Kayangan, Sape, dan Batam sebesar Rp23.108.020.000. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2020, Perusahaan berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2658/SG/JB pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah mencatat cadangan liabilitas sebesar Rp20.652.170.368 (Catatan 18).

33. KONTINJENSI (lanjutan)

a) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Dian Sentosa (lanjutan)

Setelah keputusan banding keluar, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri, Perusahaan kembali mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3170 K/PDT/2023 pada tanggal 13 November 2023, permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan ditolak. Pada tanggal 4 September 2024, Perusahaan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3170 K/PDT/2023. Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah keluar Hasil Putusan Akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Reklaas Pemberitahuan Isi Putusan PK Mahkamah Agung RI No.547 PK/Pdt/2025/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 514/Pdr.G/2019/Jkt.Pst tanggal 29 Agustus 2025 bahwa Peninjauan Kembali Perusahaan ditolak dan Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut.

Pada tahun 2025, perkara tersebut telah diselesaikan secara final dan mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp20.652.170.368.

Perusahaan telah mengakui kewajiban dan/atau beban terkait dalam laporan laba rugi tahun berjalan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh dampak keuangan dari perkara tersebut telah dicatat secara memadai dalam laporan keuangan.

b) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Infiniti Indosakti

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 630/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., PT Infiniti Indosakti mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan Kerjasama Operasi pembangunan dan pengoperasian dermaga IV Merak - Bakauheni senilai Rp111.193.200.000. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 2021, Perusahaan berkewajiban untuk mengganti rugi sebesar Rp76.500.000.000 (Catatan 6 dan 18). Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mendaftarkan banding dengan No. 232/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Pst Jo.630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 20 Desember 2021, dan telah mengajukan memori banding No. 022/T&P/I22 pada tanggal 25 Januari 2022. Atas pengajuan banding tersebut, telah keluar Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 699/Pdt/2022/PT DKI tanggal 17 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Desember 2021.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

b) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Infiniti Indosakti (lanjutan)

Saat ini Perusahaan telah mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan No. 04/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.JKT.PST tanggal 12 Januari 2023. Atas pengajuan kasasi tersebut telah keluar Hasil Putusan Akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Relaas No. 2530K/Pdt/2023 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2023 bahwa Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut. Atas putusan tersebut Perusahaan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dan telah terbit Relaas No. 967 PK/Pdt/2024 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 29 November 2024 bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan sebelumnya ditolak. Adapun atas Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 967/PDT/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Perusahaan wajib melakukan pembayaran bertahap dalam waktu 3 kali pembayaran dengan rincian yang telah ditentukan. Adapun berdasarkan Tanggapan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PK Mahkamah Agung, nilai penggantian yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan Perusahaan wajib melaksanakannya.

c) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Persada Gading Elok

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 672/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., PT Persada Gading Elok mengajukan gugatan kepada Perusahaan atas pelanggaran kesepakatan terkait dengan berakhirnya masa sewa pada ruangan di Gedung KTC pada tanggal 2 Maret 2023. Perusahaan digugat perihal masih ditinggalkannya peralatan kantor di Gedung KTC dari bulan Maret 2023 hingga bulan Oktober 2023 sehingga berkewajiban untuk mengganti kerugian sejumlah biaya sewa 7 bulan yaitu sebesar Rp8.284.182.865. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2024, Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp4.178.006.597. Perusahaan telah mengajukan banding atas putusan tersebut dan telah menerima Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 1072/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 April 2024. Perusahaan telah mengajukan kasasi dengan Akta Penerimaan Memori Kasasi No. 161/Srt.Pdt.Kas/2024/PN.JKT.PST.Jo tanggal 1 Oktober 2024. Atas Pengajuan Kasasi tersebut telah keluar Putusan Nomor. 2853 K/Pdt/2025 tertanggal 14 Agustus 2025 bahwa Pengajuan Kasasi Perusahaan ditolak dan Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut.

c) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Persada Gading Elok (lanjutan)

Pada tahun 2025, perkara tersebut telah diselesaikan secara final dan mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp4.178.006.597.

Perusahaan telah mengakui kewajiban dan/atau beban terkait dalam laporan laba rugi tahun berjalan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh dampak keuangan dari perkara tersebut telah dicatat secara memadai dalam laporan keuangan.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

d) Pendapatan Subsidi Perintis Tahun 2023

Perusahaan memiliki kontrak subsidi penyeberangan perintis dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) yang sebelumnya menggunakan skema lumpsum menjadi harga satuan dengan total nilai kontrak sebesar Rp380.079.681.349 pada tahun 2023 yang baru dibayar Rp275.729.387.536 dan masih tersisa Rp104.350.293.813.

Selanjutnya, pada November 2023, Perusahaan dan Kemenhub melakukan audiensi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diantaranya membahas adendum kontrak subsidi tahun 2023 serta permohonan pembayaran kekurangan subsidi perintis tahun 2023.

Menanggapi permohonan tersebut, Kemenhub meminta agar dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reviu oleh BPKP pada Januari 2024 terhadap dua Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai sampel, yaitu BPTD Lampung dan BPTD Jawa Timur. Hasil reviu BPKP yang diterbitkan pada 7 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa kontrak subsidi perintis tahun 2023 tidak secara eksplisit mencantumkan jenis kontrak, namun berdasarkan isi klausul kontrak, disimpulkan bahwa kontrak tersebut bersifat lumpsum.

Pada Oktober 2024 diselenggarakan rapat bersama antara Perusahaan, LKPP, BPKP, dan Kemenhub yang menghasilkan kesimpulan bahwa Perusahaan dan Kemenhub perlu menyepakati jenis kontrak subsidi perintis tahun 2023.

Pada tanggal 9 September 2025 dilaksanakan rapat dengan hasil disepakati perhitungan subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2023 menggunakan KP DRJD 6890 Tahun 2023 dari mulai Januari 2023. Pada Tanggal 10 Oktober 2025 Dirut PT ASDP mengirimkan permohonan audit ulang oleh BPKP kepada Direktorat SPASDP Kemenhub, sebagai tindaklanjut atas kesepakatan hasil rapat yang dilaksanakan pada 9 September 2025.

Pada tanggal 14 November 2025 Direktorat SPASDP mengirimkan surat permohonan Review ulang atas Pekerjaan Subsidi Angkutan PenyeberanganPerintis Tahun 2023.Pada tanggal 21 November 2025 eskalasi dan berkoordinasi dengan Direktur SPASDP terkait dengan rencana audit dan Review oleh BPKP.

Pada tanggal 23 Desember 2025 Direktorat SPASDP mengirimkan Surat Tindaklanjut Hasil Reviu BPKP atas Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa poin, dimana PT ASDP mengusulkan perhitungan kekurangan pembayaran menggunakan dasar hukum KP-DRJD 6890 Tahun 2023, sedangkan para PPK BPTD tetap berpedoman pada PR-DRJD 2 Tahun 2022 yang berdampak pada selisih kekurangan tersebut tidak dapat diakomodir yang mengakibatkan terjadinya piutang perusahaan, kemudian poin berikutnya Direktorat SPASDP menyampaikan sepanjang PT ASDP dapat menunjukan bukti ril Pengeluaran biaya tahun 2023, maka selisih biaya tersebut dapat menjadi pertimbangan selanjutnya sebagaimana aturan yang mengatur, bahwa penyelenggaraan layanan subsidi ditanggung oleh negara.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

d) Pendapatan Subsidi Perintis Tahun 2023 (lanjutan)

Pada tanggal 24 Desember 2025 Direktur Utama PT ASDP mengirimkan Balasan Surat Tindaklanjut Hasil Reviu BPKP atas Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023, dengan melampirkan *Link Google Drive* bukti pembiayaan pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023

Pada pertemuan terakhir secara informal BPKP meminta adanya Legal Opinion dari Jamdatun sebagai landasan hukum mereka melaksanakan audit terhadap pekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2023, akan tetapi pihak manajemen sampai dengan saat ini masih berusaha melakukan Langkah – Langkah alternatif supaya tidak melalui jamdatun, dan sampai saat ini masih berkoordinasi dengan pihak pihak terkait. Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan, pembahasan terkait kesepakatan atas kekurangan pembayaran subsidi perintis sebesar Rp104.350.293.813 masih berlangsung.

e) Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan DI Lintas Lembar - padang Bai

Berdasarkan perjanjian kerjasama Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan Di Lintas Lembar - padang Bai antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan kontrak Nomor Sperj.250./UM.301/ASDP-2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp.88.720.000.100, Addendum Sperj. 10/HK.301/ASDP-2022 tanggal 7 Januari 2022, Addendum Kedua SPERJ.891/ADD/UM.301/ASDP-2023 tanggal 20 November 2023 adanya penambahan nilai kontrak sebesar Rp5.032.885.000 sehingga total nilai kontrak menjadi Rp93.752.885.100 , dan addendum Ketiga Sperj.911/HK.102/ASDP-2024 tanggal 27 September 2024.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Kapal oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sampai dengan diserahterimakan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana diatur dalam Perjanjian addendum ketiga selama 59 bulan 18 hari kalender terhitung sejak Kontrak Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan di Lintas Lembar Padang Bai antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Sperj.250/UM.301/ASDP-2020 sejak 9 Maret 2020 sampai dengan 26 Februari 2025.

Pada tanggal 11 Oktober 2024, PT Industri Kapal Indonesia (Persero) memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada PT Indonesia Ferry (Persero) untuk melaksanakan pencairan Jaminan/Bank Garansi dengan Nomor : 072/D.01-IKI/Sku/X/2024 dan Nomor : 073/D.01-IKI/Sku/X/2024. Berdasarkan surat kuasa tersebut pada tanggal 20 Maret 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pencairan Jaminan dan Bank Garansi dengan jumlah Rp13.559.644.265.

Sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 26 Februari 2025, nilai pembangunan kapal yang dibukukan sebagai aset dalam konstruksi sebesar Rp29.674.901.542.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

e) Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan DI Lintas Lembar - padang Bai (lanjutan)

Pada tanggal 28 April 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat Nomor : UM.003/02379/IV/ASDP-2025, bersurat ke Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) perihal Permohonan Pendampingan Tindaklanjut Pengakhiran Kontrak Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan Di Lintas Lembar – Padang Bai. Surat tersebut telah dibalas melalui Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untuk Membuat Telaahan nomor : Print-398/G/Gph.2/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untuk Membuat Telaahan nomor : Print.-526/G/Gph.2/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

Pada tanggal 3 Desember 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat Nomor : TN.001/07556/XII/ASDP-2025 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pendampingan Hukum Dalam rangka Tindaklanjut Pengakhiran Pembangunan Kapal Lintas Lembar – Padang Bai.

Adapun tujuan pendampingan oleh Jamdatun adalah pendampingan dalam rangka tindak lanjut pengakhiran perjanjian Pembangunan 1 (Satu) unit kapal penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai dan Memberikan telaah dan masukan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam aspek hukum dalam rangka tindaklanjut pengakhiran perjanjian Pembangunan 1 (Satu) unit kapal penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai.

34. KASUS HUKUM

a) Akuisisi Saham PT Jembatan Nusantara

Pada pertengahan tahun 2024, terdapat kasus hukum yang sedang dihadapi oleh 3 (tiga) orang Direksi Perusahaan yang menjabat sejak 2017 sampai dengan permasalahan hukum ini timbul. Kasus hukum tersebut dikaitkan dengan aksi korporasi Perusahaan dalam mengakuisisi PT Jembatan Nusantara pada awal tahun 2022 yang menurut institusi penegak hukum dalam prosesnya terdapat pelanggaran atas peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta diduga menimbulkan kerugian negara. Namun demikian, mengingat kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut diindikasikan bukan merupakan tindak pidana korporasi, maka dampak hukum akan tertuju kepada pertanggungjawaban perorangan dan bukan kepada Perusahaan.

berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhkan vonis pidana terhadap 3 (tiga) orang mantan Direksi Perusahaan pada tanggal 20 November 2025. Adapun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pemberian Rehabilitasi, pada tanggal 25 November 2025, 3 (tiga) orang mantan Direksi Perusahaan tersebut diberikan rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

34. KASUS HUKUM (lanjutan)

b) Gugatan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kepada AJB Bumiputera

Perusahaan menjalin kemitraan dengan AJB Bumiputera melalui program asuransi Tunjangan Hari Tua (THT) sebagai wujud komitmen nyata dalam menjamin kesejahteraan jangka panjang seluruh karyawan.

Adanya indikasi wanprestasi dari AJB Bumiputera berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran klaim sesuai polis/perjanjian, maka perusahaan mengambil langkah penangguhan sementara pembayaran premi guna mencegah potensi kerugian yang lebih besar.

Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023, berdasarkan Surat Tagihan AJB Bumiputera tanggal 05 April 2023, untuk periode premi Februari 2022 s.d. Oktober 2022, dengan total nilai sebesar Rp1.290.950.470.

Meskipun tidak ada setoran ke AJB Bumiputera, namun sampai dengan periode berakhirnya laporan keuangan Tahun 2025 perusahaan tetap melakukan pemotongan iuran THT yang dilaksanakan setiap bulan. Dana hasil pemotongan tersebut tetap dicatat dan dikelola secara terpisah (dalam rekening penampungan), sehingga sewaktu-waktu dapat disalurkan setelah terdapat kejelasan aspek administratif dan/atau penyelesaian permasalahan dengan pihak AJB Bumiputera.

Perusahaan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada peserta THT dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan aset perusahaan. Seluruh dana iuran yang telah dipotong masih tersedia dan teradministrasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi karyawan.

Selanjutnya perusahaan akan mengambil langkah hukum sebagai upaya untuk memperoleh kepastian atas hak dan kewajiban para pihak, termasuk kejelasan status dana dan pemenuhan kewajiban AJB Bumiputera. Perusahaan akan melakukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut berdasarkan perkembangan hasil proses hukum dan/atau kesepakatan para pihak.

Oleh karena itu Manajemen berpendapat bahwa kasus hukum yang sedang dihadapi oleh para mantan direksi tersebut dipandang tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada 31 Desember 2024. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana pada proses akuisisi PT Jembatan Nusantara ini masih dalam proses penyidikan. Namun demikian, terdapat ketidakpastian mengenai apakah terdapat kerugian keuangan dan nonkeuangan lebih lanjut terhadap Perusahaan sebagai konsekuensi kasus tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut belum dapat diperkirakan.

35. PERJANJIAN PENTING

a) Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Operasi Tiketing Sistem Di 4 (Empat) Pelabuhan Perusahaan antara Perusahaan dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) Nomor. Sper.1172/UM.301/ASDP-2025 dan Nomor: K.TEL./HK.810/SOE-00/2025 disepakati bahwa Perusahaan dan PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) bahwa PT Telekomunikasi menyediakan sistem penjualan tiket elektronik (software, hardware, dan infrastruktur pendukung) dan meliputi aspek investasi, proses bisnis, teknologi, manajemen proyek, support maintenance, komersial, laporan dan Service Level Agreement (SLA). Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

b) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Payment Gateway Pada Platform Ferizy di lingkungan Perusahaan antara Perusahaan dengan PT Finnet Indonesia No Sperj.371/HK.102/JKTNS/V/ASDP-2025N tanggal 09 Mei 2025 dan addendumnya No. Sperj.1355/HK.102/JKTNC/XII/ASDP-2025 tanggal 17 Desember 2025, disepakati bahwa Perusahaan dan PT Finnet Indonesia melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan Payment Gateway yang terintegrasi untuk kelancaran operasional dan pelayanan Platform Ferizy. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

c) Pada tanggal 29 Desember 2023 Perusahaan telah memandatangani pembaharuan perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Ternak RT-6 melalui perjanjian No. SPERJ.1064/HK.102/ASDP-2023 antara Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Ditlala), disepakati bahwa Perusahaan menyelenggarakan angkutan khusus ternak pada trayek tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan menggunakan kapal milik Ditlala. Perjanjian ini menggantikan perjanjian sebelumnya yaitu No. ADD.01/SATKERLALA/RT-6/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023. Selanjutnya, berdasarkan Amendemen III perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Ternak Trayek RT-6 Tahun Anggaran 2024 tanggal 30 September 2024 No. 03.ADD/RT-6/LALA/2024, nilai kontrak perjanjian adalah sebesar Rp15.843.254.347 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Perjanjian ini telah dilakukan perpanjangan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan perjanjian No. Sperj.1286/UM.301/ASDP-2024 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2026.

d) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Penyeberangan Secara Host to Host dengan Mekanisme Settlement, Perusahaan dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk (MUI) No. SPERJ.519/HK.102/ASDP-2022 tanggal 27 September 2022, dan addendumnya No. SPERJ.1015/HK.102/ASDP-2025 tanggal 28 Agustus 2025 disepakati bahwa PT Midi Utama Indonesia akan menyediakan layanan reservasi tiket di gerai Alfamidi kepada para pengguna jasa kapal penyeberangan dan Perusahaan berkewajiban menyediakan perangkat yang diperlukan untuk penyaluran traffic data tiket di host. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyusunan.

35. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

e) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reservasi dan Sales Payment Tiket Kapal Penyeberangan Secara Host to Host antara Perusahaan dengan PT Global Tiket Network No. Sperj.1101/JKTNS/X/ASDP-2025 mengenai Integrasi Sistem Reservasi dan Sales Payment Tiket Kapal Penyeberangan melalui Platform Tiket.Com tanggal 1 Oktober 2025 disepakati bahwa PT Global Tiket Network menyediakan layanan reservasi tiket melalui Aplikasi Tiket.com kepada para pengguna jasa kapal penyeberangan. Perjanjian ini berlaku hingga 19 November 2026.

f) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Taman Hiburan *(Theme Park)* pada Kawasan Bakauheni Harbour City antara Perusahaan dengan PT Bunga Lampung Sedjati No. Sperj.245/HK.102/ASDP-2022 tanggal 30 Bulan Mei 2022, Perusahaan menyepakati pendayagunaan aset tanah Perusahaan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan serta melakukan Kerja Sama Usaha (KSU) pengembangan *Theme Park* pada Kawasan Bakauheni Harbour City dengan PT Bunga Lampung Sedjati. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun kalender terhitung sejak *Theme Park* mulai beroperasi dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Siap Operasional pada Mei 2023.

g) IFPRO dalam melaksanakan bisnis hotelnya bekerja sama dengan PT Hotel Indonesia Group sebagai operator hotel sebagaimana perjanjian kerjasama No. 002/IPRO/PKS/IV/2019 dan No. 001/DIRUT/HIG-PERJ/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel di Labuan Bajo dengan Addendum Perjanjian No. 009/IFPRO-DIR/PKS/X/2022 dan No. 020/LGL-HIG/AMEND.PERJ/IX/2022. IFPRO memberikan izin kepada Hotel Indonesia Group untuk mengelola hotel milik Perusahaan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha Hotel Indonesia Group yang berlokasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dengan luas kurang lebih 2,4 Ha untuk manajemen hotel dengan merek dagang Meruorah Komodo Labuan Bajo. Bentuk Kerjasama adalah Kerjasama Operasi Pengelolaan Hotel dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah hotel beroperasi.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mendefinisikan risiko- risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Dalam rangka mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi telah menentukan beberapa pedoman kebijakan pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup. Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup;
- Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin off-setting alami antara pendapatan dan biaya dan utang/pinjaman dan piutang dalam mata uang yang sama; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Grup mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak dan dapat dipercaya. Grup juga membentuk akun penurunan nilai piutang atas piutang usaha yang timbul dari kemungkinan ketidakmampuan pelanggan untuk memenuhi liabilitas kontraktual terhadap Grup. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas dan Setara Kas	1.940.072.274.317	1.836.374.520.725
Piutang Usaha	73.633.930.409	31.750.747.382
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	100.622.866.956	60.668.244.291
Aset Keuangan Lancar Lainnya	62.628.780.963	47.115.075.190
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.387.185.873	275.434.971.034
Total	**2.452.345.038.518**	**2.251.343.558.622**

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Kualitas Kredit Aset Keuangan (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan selalu menjaga dan menyediakan jumlah kas dan setara kas sesuai dengan kebutuhan operasional dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut memperlihatkan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya

	2025		
	Kurang dari 1 Tahun	> 1 Tahun	Total
Liabilitas Keuangan			
Utang Usaha	456.977.472.815	-	456.977.472.815
Utang Asuransi	26.854.074.367	-	26.854.074.367
Beban Akrual	304.756.044.659	-	304.756.044.659
Utang Bank Jangka Pendek	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	121.956.603.029	-	121.956.603.029
Utang Bank Jangka Panjang	259.697.547.739	206.036.856.955	465.734.404.694
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	-	6.049.019.037	6.049.019.037
Pinjaman Sindikasi	44.400.000.000	587.663.376.149	632.063.376.149
Total	**1.214.641.742.609**	**799.749.252.141**	**2.014.390.994.750**

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2024		
	Kurang dari 1 Tahun	> 1 Tahun	Total
Liabilitas Keuangan			
Utang Usaha	449.645.404.142	-	449.645.404.142
Utang Asuransi	25.836.228.882	-	25.836.228.882
Beban Akrual	262.055.259.825	-	262.055.259.825
Utang Bank Jangka Pendek	23.836.020.000	-	23.836.020.000
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	117.557.688.995	-	117.557.688.995
Utang Bank Jangka Panjang	263.432.165.478	449.402.237.748	712.834.403.226
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	-	7.344.762.849	7.344.762.849
Pinjaman Sindikasi	34.300.000.000	630.902.417.816	665.202.417.816
Total	**1.176.662.767.322**	**1.087.649.418.413**	**2.264.312.185.735**

Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Untuk meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bunga Tetap	1.109.122.805.869	1.254.654.341.042
Bunga Mengambang	122.655.500.000	147.218.500.000
Tanpa Bunga	808.852.834.335	862.439.344.693
Total	**2.040.631.140.204**	**2.264.312.185.735**

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat bunga. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan		
Perubahan Tingkat Suku Bunga (1%)	(88.925.238)	(106.733.413)
Perubahan Tingkat Suku Bunga (-1%)	88.925.238	106.733.413

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar, diungkapkan dalam Catatan 32.

Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari saldo kas dan setara kasnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan		
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (1%)	433.375.226	407.708.493
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (-1%)	(433.375.226)	(407.708.493)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2025		2024	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	1.940.072.274.317	1.940.072.274.317	1.836.374.520.725	1.836.374.520.725
Piutang Usaha	73.633.930.409	73.633.930.409	31.750.747.382	31.750.747.382
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	100.622.866.956	100.622.866.956	60.668.244.291	60.668.244.291
Aset Keuangan Lancar Lainnya	62.628.780.963	62.628.780.963	47.115.075.190	47.115.075.190
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.387.185.873	275.387.185.873	275.434.971.034	275.434.971.034
	2.452.345.038.518	**2.452.345.038.518**	**2.251.343.558.622**	**2.251.343.558.622**
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha	456.977.472.815	456.977.472.815	449.645.404.142	449.645.404.142
Utang Asuransi	26.854.074.367	26.854.074.367	25.836.228.882	25.836.228.882
Beban Akrual	304.756.044.659	304.756.044.659	262.055.259.825	262.055.259.825
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	121.956.603.029	121.956.603.029	117.557.688.995	117.557.688.995
Utang Bank Jangka Pendek	-	-	23.836.020.000	23.836.020.000
Utang Bank Jangka Panjang	465.734.404.694	465.734.404.694	712.834.403.226	712.834.403.226
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	6.049.019.037	6.049.019.037	7.344.762.849	7.344.762.849
Pinjaman Sindikasi	632.063.376.149	632.063.376.149	665.202.417.816	665.202.417.816
	2.014.390.994.750	**2.014.390.994.750**	**2.264.312.185.735**	**2.264.312.185.735**

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif serta untuk memaksimumkan nilai Grup.

Dalam mendesain struktur permodalan yang dapat meningkatkan nilai Grup, manajemen dapat melakukannya dengan cara menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau mengurangi maupun menambah jumlah utang.

37. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Transaksi Non-Kas

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penambahan Aset Hak-Guna melalui Liabilitas Sewa	9.737.935.000	14.356.160.457
Perolehan Aset Tetap melalui Utang Usaha	-	4.349.717.754

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025						
	Saldo Awal	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir
		Pencairan	Pembayaran	Penambahan	Bunga	Amortisasi	
Pinjaman Sindikasi	665.202.417.816	-	(34.300.000.000)	-	-	1.160.958.333	632.063.376.149
Liabilitas Sewa	23.026.186.738	-	(24.255.618.238)		(1.234.269.285)	13.788.725.811	11.325.025.026
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	13.407.658.513	130.700.000.500	(143.300.000.500)	-	(51.140.746)		756.517.767
Utang Bank	736.670.423.226	-	(270.936.018.532)	-	-	-	465.734.404.694

	2024						
	Saldo Awal	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir
		Pencairan	Pembayaran	Penambahan	Bunga	Amortisasi	
Pinjaman Sindikasi	682.703.916.666	-	(26.300.000.000)	-	-	8.798.501.150	665.202.417.816
Liabilitas Sewa	47.927.364.690	-	(41.388.939.255)	14.356.160.457	2.131.600.846	-	23.026.186.738
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	10.714.003.871	124.793.654.642	(122.100.000.000)	-	-	-	13.407.658.513
Utang Bank	833.391.883.725	159.500.000.000	(256.221.460.499)	-	-	-	736.670.423.226

38. KELANGSUNGAN USAHA PT JEMBATAN NUSANTARA

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, yaitu bahwa Perusahaan akan dapat merealisasikan asetnya dan menyelesaikan liabilitasnya dalam kegiatan usaha normal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp255.635.425.786 dan memiliki saldo defisit sebesar Rp577.056.184.902. Selain itu, Perusahaan juga menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan yang tercermin dari keterbatasan kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban kepada pemasok, kewajiban perpajakan, serta kewajiban operasional lainnya yang telah jatuh tempo.

38. KELANGSUNGAN USAHA PT JEMBATAN NUSANTARA (lanjutan)

Perusahaan juga memiliki jumlah liabilitas jangka pendek yang signifikan sebesar Rp564.286.665.620 yang melebihi kemampuan kas operasional jangka pendek. Di samping itu, sebagian armada kapal Perusahaan dalam kondisi tidak beroperasi secara optimal karena sedang dalam proses docking dan/atau menunggu jadwal docking, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan utilisasi aset.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

1. Dukungan Pemegang Saham

Perusahaan memperoleh dukungan dari pemegang saham pengendali, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dalam bentuk komitmen dukungan finansial untuk memastikan Perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Dukungan tersebut mencakup antara lain:

- Perpanjangan dan/atau rollover atas fasilitas shareholder loan (SHL);
- Tidak menuntut pelunasan SHL dalam periode dukungan;
- Penyediaan tambahan pendanaan apabila diperlukan untuk menutup kekurangan kas;
- Dukungan terhadap pemenuhan kewajiban kepada kreditur, pemasok, dan kewajiban operasional lainnya.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan, proses formal persetujuan atas tambahan fasilitas shareholder loan masih dalam tahap penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Proyeksi Arus Kas

Manajemen telah menyusun proyeksi arus kas untuk periode 5 tahun (2026-2030) sejak tanggal laporan keuangan yang mempertimbangkan:

- Pemulihan bertahap jumlah kapal operasional melalui program docking.
- Peningkatan utilitas armada;
- Efisiensi biaya operasional; dan
- Dukungan finansial dari pemegang saham

Manajemen berkeyakinan bahwa, asumsi yang digunakan dalam proyeksi tersebut adalah wajar dan dapat dicapai.

3. Optimalisasi Operasional

Perusahaan melakukan langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi operasional, antara lain:

- Percepatan proses docking kapal untuk meningkatkan utilisasi armada;
- Penyesuaian rute dan jadwal operasional;
- Pengendalian biaya operasional dan overhead.

38. KELANGSUNGAN USAHA PT JEMBATAN NUSANTARA (lanjutan)

3. Optimalisasi Operasional (lanjutan)

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul apabila Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan melakukan perubahan struktur organisasi melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.45/HK.002/JKTHS/II/ASDP-2026 tentang Organisasi dan Perangkat Pendukung di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 6 Februari 2026. Perubahan struktur organisasi ini sebagai bagian dari strategis peningkatan efisiensi operasional. Perubahan ini meliputi penggabungan beberapa divisi dan pembentukan unit bisnis baru. Manajemen berpendapat bahwa perubahan ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Adapun ruang lingkup Keputusan Direksi ini meliputi:
1. Struktur Organisasi Perusahaan;
2. Kelas Cabang;
3. Perubahan Struktur Oganisasi;
4. Pelimpahan Wewenang SDM;
5. Sistem Grading;
6. Jabatan Fungsional.

Perusahaan melakukan perubahan struktur organisasi sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi operasional. Perubahan ini meliputi penggabungan beberapa divisi dan pembentukan unit bisnis baru. Manjemen berpendapat bahwa perubahan ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

40. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai “Informasi Keuangan Entitas Induk”) yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia.

40. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN (lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab Manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

41. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN (TIDAK DIAUDIT)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

Kontribusi Pajak

Informasi keuangan tambahan menyajikan informasi terkait konstribusi Perusahaan dan Entitas Anak kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-32/DKU.MBU/08/2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pajak		
Pajak Penghasilan (PPh)	134.946.193.577	148.792.262.524
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	106.266.984.977	78.091.380.318
Pajak Pemerintah Daerah	1.205.091.749	689.565.630
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.861.194.266	6.752.999.516
Sub Total	**249.279.464.569**	**234.326.207.988**
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
PNBP Lainnya	6.778.678.797	4.532.849.428
Sub Total	**6.778.678.797**	**4.532.849.428**
Total	**256.058.143.366**	**238.859.057.416**

42. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan pada tanggal 8 April 2026.

INFORMASI TAMBAHAN

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	1.829.173.430.066	1.713.613.544.262
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi	52.465.479.677	31.193.345.779
Pihak Ketiga	28.519.840.186	17.700.177.311
Aset Keuangan Lancar Lainnya	315.616.891.983	212.798.428.056
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	110.678.282.838	76.459.023.162
Persediaan	119.887.968.526	99.146.929.107
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	39.013.435.547	23.131.793.527
Pajak Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah Aset Lancar	**2.495.355.328.823**	**2.174.043.241.204**
Aset Tidak Lancar		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima -		
Pihak Berelasi	65.437.720.644	85.627.167.675
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.387.185.873	275.434.971.035
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka		
Jangka Panjang	391.080.139	467.889.787
Investasi Saham pada Entitas Anak	1.421.133.985.889	1.421.133.985.889
Properti Investasi	157.754.379.996	161.707.695.900
Aset Tetap	5.993.920.203.289	5.962.874.147.194
Aset Hak-Guna	21.826.697.526	22.197.556.151
Aset Takberwujud	16.130.877.125	22.406.092.697
Jumlah Aset Tidak Lancar	**7.951.982.130.481**	**7.951.849.506.328**
JUMLAH ASET	**10.447.337.459.304**	**10.125.892.747.532**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha		
Pihak Berelasi	48.750.456.931	41.218.845.468
Pihak Ketiga	305.578.174.501	289.753.462.304
Utang Pajak	35.849.232.543	37.252.586.157
Utang Asuransi	25.569.760.581	25.092.018.076
Beban Akrual	337.483.343.660	342.814.822.969
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	102.469.965.157	93.527.099.586
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam satu tahun:		
Liabilitas Sewa	4.214.569.267	11.390.435.149
Utang Bank	174.563.000.000	174.563.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.034.478.502.640**	**1.015.612.269.709**
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:		
Utang Bank	173.092.500.000	347.655.500.000
Liabilitas Sewa	2.737.073.168	5.494.615.404
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	3.315.102.327	4.786.009.128
Liabilitas Imbalan Pascakerja	100.088.255.079	113.504.956.227
Liabilitas Pajak Tangguhan	46.031.975.834	32.297.506.792
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**325.264.906.408**	**503.738.587.551**
Jumlah Liabilitas	**1.359.743.409.048**	**1.519.350.857.260**
Ekuitas		
Modal Saham	5.561.760.000.000	5.561.760.000.000
Tambahan Modal Disetor	8.445.362.065	8.445.362.065
Saldo Laba		
Telah Ditentukan Penggunaannya	2.807.583.928.196	2.413.803.355.650
Belum Ditentukan Penggunaannya	709.804.759.995	622.533.172.557
Jumlah Ekuitas	**9.087.594.050.256**	**8.606.541.890.272**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**10.447.337.459.304**	**10.125.892.747.532**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
Pendapatan Usaha	4.491.560.257.681	4.366.737.247.138
Beban Pokok Pendapatan	(2.980.244.152.753)	(2.854.921.091.868)
Laba Usaha	**1.511.316.104.928**	**1.511.816.155.270**
Beban Usaha		
Beban Umum dan Administrasi	(1.075.858.956.135)	(1.019.735.594.493)
Pendapatan Lain-lain - Neto	134.125.580.832	69.465.433.609
Laba Sebelum Pajak	**569.582.729.625**	**561.545.994.386**
Beban Pajak		
Pajak Kini	(24.302.273.160)	(24.588.646.720)
Pajak Tangguhan	(14.951.006.551)	(14.710.450.536)
Jumlah Beban Pajak	**(39.253.279.711)**	**(39.299.097.256)**
Laba Tahun Berjalan	**530.329.449.914**	**522.246.897.130**
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti	(5.529.715.950)	(4.660.980.510)
Pajak Terkait	1.216.537.509	1.025.415.712
Penghasilan Komprehensif Lain	**(4.313.178.441)**	**(3.635.564.798)**
Jumlah Penghasilan Komprehensif	**526.016.271.473**	**518.611.332.332**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal yang Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo Per 31 Desember 2023	**5.173.195.000.000**	**397.010.172.065**	**1.831.026.929.440**	**717.370.909.920**	**8.118.603.011.425**
Modal Ditempatkan dan Disetor	388.565.000.000	(388.564.810.000)	(190.000)	-	-
Alokasi Cadangan Umum	-	-	582.776.616.210	(582.776.616.210)	-
Dividen Tunai	-	-	-	(30.672.453.485)	(30.672.453.485)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	522.246.897.130	522.246.897.130
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(3.635.564.798)	(3.635.564.798)
Saldo Per 31 Desember 2024	**5.561.760.000.000**	**8.445.362.065**	**2.413.803.355.650**	**622.533.172.557**	**8.606.541.890.272**
Alokasi Cadangan Umum	-	-	393.780.572.546	(393.780.572.546)	-
Dividen Tunai	-	-	-	(44.964.111.489)	(44.964.111.489)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	530.329.449.914	530.329.449.914
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(4.313.178.441)	(4.313.178.441)
Saldo Per 31 Desember 2025	**5.561.760.000.000**	**8.445.362.065**	**2.807.583.928.196**	**709.804.759.995**	**9.087.594.050.256**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pelanggan		4.404.629.195.892	4.402.732.655.387
Pembayaran Kas Kepada Pemasok		(1.948.680.033.978)	(1.866.149.511.662)
Pembayaran Kepada Karyawan		(1.053.985.322.122)	(993.783.071.595)
Pembayaran Beban Usaha		(562.728.772.830)	(525.149.890.370)
Penerimaan/(Pembayaran) Lain-lain		6.650.479.509	24.799.727.751
Pengeluaran Lain-lain			
Pembayaran Bunga Pinjaman - Neto		(16.928.382.100)	(22.030.117.904)
Penerimaan Bunga - Neto		90.185.040.462	75.156.841.833
Pembayaran Pajak Penghasilan		(96.076.864.472)	(81.841.870.488)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**823.065.340.361**	**1.013.734.762.952**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Jaminan Usaha		43.720.341.127	30.252.327.477
Pembayaran Jaminan Usaha		(33.194.295.809)	(29.318.151.568)
Perolehan Aset Tetap		(474.092.192.523)	(594.289.392.949)
Peningkatan Biaya Transisi & Transformasi Ditangguhkan		-	-
Perolehan Aset Takberwujud		(2.224.327.606)	(9.346.283.530)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(465.790.474.811)**	**(602.701.500.570)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Liabilitas Sewa		(22.187.868.253)	(40.067.848.668)
Penerimaan Pinjaman Bank		-	159.500.000.000
Pembayaran Pinjaman Bank		(174.563.000.000)	(162.281.500.000)
Pembayaran Dividen		(44.964.111.493)	(30.672.453.485)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(241.714.979.746)**	**(73.521.802.153)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		**115.559.885.804**	**337.511.460.229**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	2e;2f;4	**1.713.613.544.262**	**1.376.102.084.033**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	2e;2f;4	**1.829.173.430.066**	**1.713.613.544.262**